

**ANALISIS PERANAN PUSAT PERTUMBUHAN
TERHADAP DAERAH BELAKANG (*HINTERLAND*) :
APLIKASI TEORI INTERAKSI
(STUDI KASUS KOTA MALANG DAN SSWP II
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Asfiyani
0510210014**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

"Analisis Peranan Pusat Pertumbuhan Terhadap Daerah Belakang (*Hinterland*) : Aplikasi Teori Interaksi (Studi Kasus Kota Malang dan SSWP II Kabupaten Malang)".

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Ide awal penulisan Skripsi ini timbul karena adanya fenomena arus penduduk dari wilayah belakang atau Kabupaten Malang menuju wilayah pusat atau Kota Malang yang terjadi setiap harinya sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas pada jalan-jalan utama. Tingginya mobilitas masyarakat menuju pusat pertumbuhan menyebabkan interaksi yang terjadi juga meningkat. Adanya interaksi akan menyebabkan pergeseran sektoral daerah asal dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila memang dari interaksi tersebut terjadi *spread effect*. Setelah mengkaji beberapa teori yang berkaitan dengan interaksi, pusat pertumbuhan dan daerah belakang, penulis menetapkan bahwa peranan pusat pertumbuhan yang dapat dilihat dari besar kecilnya angka pada Indeks Interaksi dipengaruhi oleh variabel jarak dan jumlah penduduk.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak Dr. Sasongko, SE., MS. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan saran serta petunjuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ghazali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

3. Bapak Dr. Gugus Irianto, SE., MSA., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
4. Segenap Dosen dikalangan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada penulis
5. Seluruh staf Jurusan Ekonomi Pembangunan, Pak Rofik, Pak Dim, Mbak Fitri, Pak Im dan Pak Supadi,...nuhun =)
6. Bapak Dr. Susilo, SE., MS., atas bimbingan, bantuan dan kepercayaannya kepada penulis selama ini, baik dalam kuliah maupun kerja. Pelajaran untuk memasuki dunia kerja dan juga cara memaknai hidup dari Bapak sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis
7. Keluarga besar Bapak Widji (Alm.) di Tulungagung dan Keluarga Bapak Takrip (Alm.) di Malang, atas dukungan moril maupun materiil, doa dan petuah-petuah hidup yang ditujukan pada penulis
8. Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa henti serta limpahan kasih sayang selama ini
9. Mas Asfi beserta keluarga, Mbak Nap beserta keluarga, Mieta beserta keluarga dan juga sahabat lama, Prama beserta keluarga; terima kasih,...mereka selalu mempunyai cara untuk mendukung dan membantu penulis
10. Bapak Fadilah sekeluarga,...atas doa dan bantuannya menenangkan dan mengingatkan penulis akan tujuan utama hidup yaitu menjadi manusia yang bermanfaat
11. Agnes, Ulet Bulu, Deasy, Dew, Iti dan Adel,...atas persahabatan yang terjalin selama ini.
12. AgiL, Uwie, Heru, Ion, _dieN, dan mas Prima,...atas persahabatan dan persaudaraannya, keindahan berbagi dan ketulusannya selama ini
13. Kakak dan juga Ardhi,...yang mengajarkan penulis untuk menjalani hidup dengan keikhlasan. Kasih sayang yang tercurah menguatkan penulis dalam setiap langkah kecilnya ^.
14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, *thanks for all of support and keep our spirit on* =)
15. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Seperti kata pepatah bahwa “*tidak ada gading yang tidak retak*” dan dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan (baik dari isi maupun penyajiannya). Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis bersama semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi ini berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Amin.

Malang, Juli 2009

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

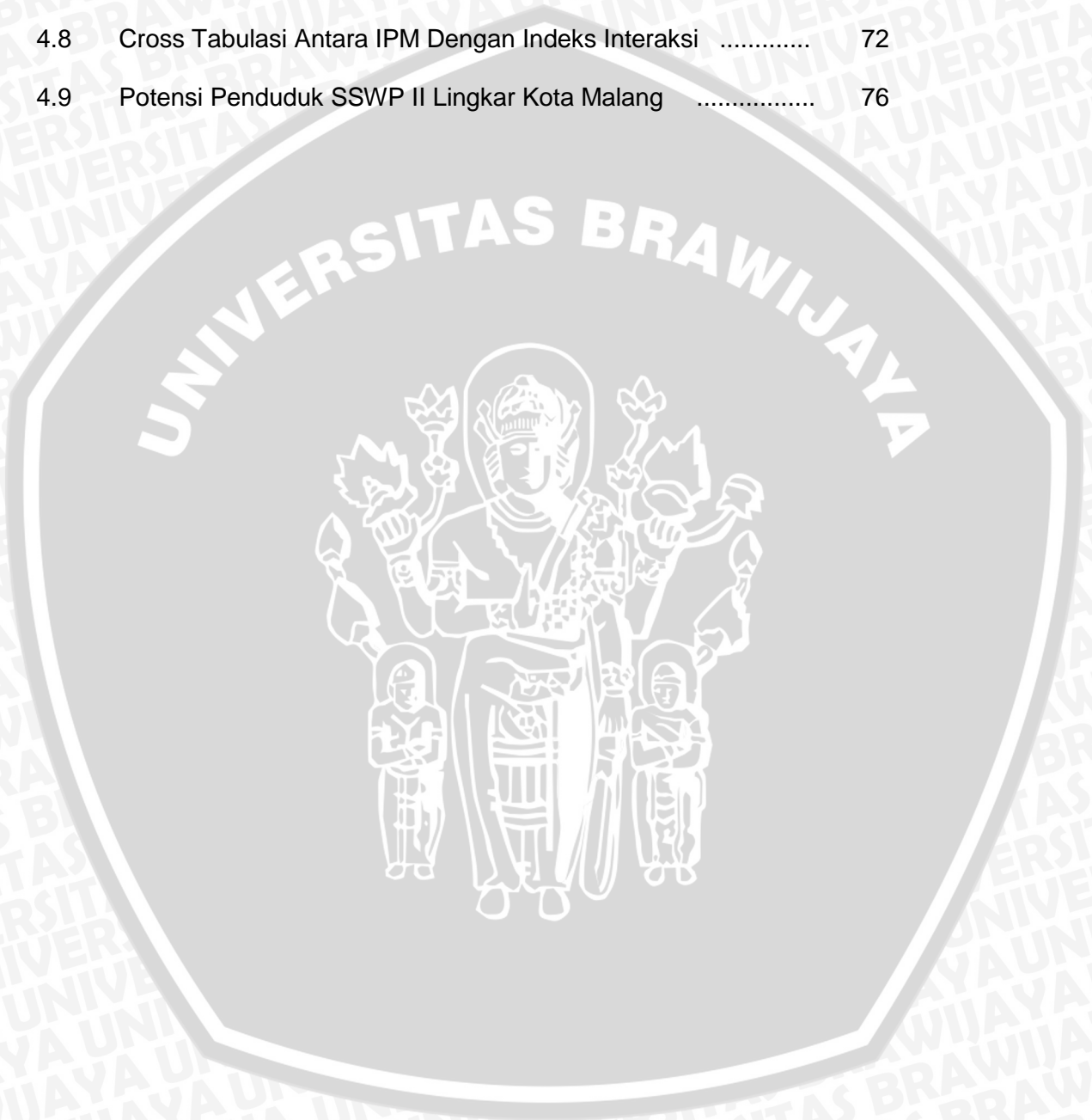
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pusat Pertumbuhan	15
2.1.1 Definisi	15
2.1.2 Teori Pusat Pertumbuhan	18
2.1.3 Peranan/Manfaat Kota	22
2.1.4 Ciri-ciri Wilayah Pusat Pertumbuhan	24
2.1.5 Aglomerasi	25
2.2 Daerah Belakang (Hinterland)	28
2.2.1 Definisi	28
2.3 Teori Interaksi	29
2.3.1 Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat	34
2.3.2 Kesejahteraan Masyarakat	38
2.4 Penelitian Terdahulu	39
2.5 Kerangka Pemikiran	41

2.6 Hipotesis	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	44
3.1.1 Jenis Penelitian	45
3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.1.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.1.3.1 Jenis dan Sumber Data	47
3.1.3.2 Teknik Pengumpulan Data	48
3.2 Definisi Operasional Dari Variabel Penelitian	49
3.3 Teknik Analisa Data	51
3.3.1 Analisa Indeks Interaksi	52
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang	54
4.1.2 Gambaran Umum SSWP II Kabupaten Malang	58
4.2 Analisis dan Interpretasi Data	62
4.2.1 Hasil Perhitungan dan Analisis Indeks Interaksi	62
4.2.2 Statistik Deskriptif	65
4.3 Pembahasan	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.1	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang	3
1.2	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Tahun 2007	5
1.3	Jumlah Industri Menurut Kategori dan Kecamatan Tahun 2007	6
1.4	Sumbangan Sektoral PDRB Kota Malang	6
1.5	Jumlah SLTA Negeri dan Swasta Kota Malang Tahun 2007	7
1.6	Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Malang	8
1.7	PDRB ADHK2000 Kabupaten Malang Tahun 2002-2007 (dalam milyaran rupiah)	8
1.8	IPM per Kecamatan Pada Wilayah SSPW II Lingkaran Kota Malang Tahun 2008	10
1.9	UMK Kota Malang dan Kabupaten Malang	11
1.10	Jarak Antar Kecamatan SSPW II Dengan Kota Malang	12
2.1	Pembagian Zona Interaksi	30
2.2	Penelitian Terdahulu	39
4.1	Perhitungan Paritas Daya Beli per Kecamatan	56
4.2	Angka Harapan Hidup Kota Malang Dirinci Menurut Kecamatan	56
4.3	Jumlah Tamatan Sekolah di Kota Malang	57
4.4	IPM SSWP II Lingkaran Kota Malang	59
4.5	Jarak Antar Kecamatan-kecamatan Pada SSWP II	

	Dengan Kota Malang	61
4.6	Hasil Analisis Indeks Interaksi	62
4.7	Hasil Analisis Data Primer	66
4.8	Cross Tabulasi Antara IPM Dengan Indeks Interaksi	72
4.9	Potensi Penduduk SSWP II Lingkar Kota Malang	76



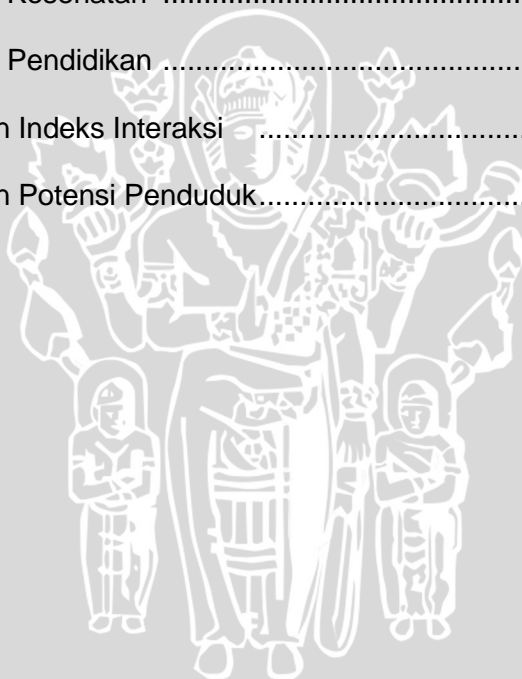
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
2.1	Kerangka Pemikiran	41



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Kuesioner Perusahaan	84
2.	Kuesioner Puskesmas/Rumah Sakit	85
3.	Kuesioner SMAN/SMKN	86
4.	Kuesioner Responden	87
5.	Data Responden Industri	88
6.	Data Responden Kesehatan	91
7.	Data Responden Pendidikan	92
8.	Hasil Perhitungan Indeks Interaksi	94
9.	Hasil Perhitungan Potensi Penduduk.....	95



ABSTRAKSI

Asfiyani. 2009. *Analisis Peranan Pusat Pertumbuhan Terhadap Daerah Belakang (Hinterland) : Aplikasi Teori Interaksi (Studi Kasus Kota Malang dan SSWP II Kabupaten Malang)*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Dr. Sasongko, SE., MS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan, dibidang pendidikan dan kesehatan serta daya serap tenaga kerja Kabupaten Malang yang diwakili oleh SSWP II. Untuk membuktikan adanya peranan Kota Malang terhadap Kabupaten Malang, pertama akan dihitung interaksi antara dua wilayah yang berbatasan langsung tersebut melalui Indeks Interaksi. Setelah diketahui besarnya Indeks Interaksi, maka hasil akan di deskripsikan dengan dukungan data primer yang telah diolah menggunakan teknik statistic deskriptif berdasarkan pada nilai tendensi sentral.

Hasil perhitungan dari Indeks Interaksi diketahui bahwa memang terjadi interaksi yang kuat antara pusat pertumbuhan (Kota Malang) dengan daerah belakang (Kabupaten Malang). Besarnya angka Indeks Interaksi yang mencapai lebih dari delapan digit di depan koma, menggambarkan bahwa mobilitas masyarakat dari daerah *hinterland* menuju pusat pertumbuhan adalah tinggi. Tingginya animo masyarakat menuju pusat dipengaruhi oleh adanya faktor penarik dari pusat berupa fasilitas-fasilitas social dan juga faktor pendorong dari daerah asal. Menurut hubungannya, Kota Malang merupakan Kota Generatif. Hal ini didukung oleh data primer, dari total responden bidang pendidikan, rata-rata 60% siswa SMKN dan SMAN di daerah perbatasan berasal dari Kabupaten Malang. Sedangkan penduduk kabupaten yang memanfaatkan tempat layanan kesehatan diwilayah perbatasan Kota Malang berkisar antara 30%-50%. Daya serap industri kota terhadap pekerja kabupaten juga besar. Tidak kurang dari 60% pekerja berasal dari Kabupaten Malang. Mayoritas responden yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas di wilayah perbatasan mempertimbangkan faktor jarak dan kemudahan akses dalam mencapai tempat tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan ikut membaik seiring dengan tingginya angka pada Indeks Interaksi.

Kata Kunci:

Pusat pertumbuhan

Hinterland

Indeks Interaksi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pentingnya perencanaan regional bukan hanya untuk kepentingan daerah-daerah saja melainkan untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Antara lain dikemukakan oleh Gunnar Myrdal bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan *back wash effect* yaitu menaikkan tenaga kerja dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai dibangun, sehingga daerah lain disekitar itu menjadi mundur dan terbelakang. Segala tindakan pembangunan harus ditujukan untuk melaksanakan *spread effect* yaitu perluasan aktivitas dari pusat pembangunan ekonomi ke daerah lain (dalam Bintarto, 1994:130).

John Glasson, 1991:172 (Asri, 1998:3) berpendapat mengenai teori pusat pertumbuhan tersebut. Menurutnya, teori tersebut dijabarkan secara induktif dari pengamatan atas proses perkembangan ekonomi. Perkembangan pusat pertumbuhan dalam ruang ekonomi adalah suatu usaha yang dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekangan dimensi-dimensi geografik. Teori ini mengembangkan suatu tipologi ruang ekonomi, yang terpenting diantaranya adalah tipologi ruang ekonomi sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan, dari tipologi tersebut dijabarkan konsep suatu kutub atau pusat sebagai vector dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan, ruang ekonomi terdiri dari pusat-pusat atau kutub-kutub darimana memencar kekuatan sentrifugal dan kemana kekuatan-kekuatan sentripetal ditarik.

Ada beberapa sebab mengapa teori ini sangat menarik sebagai suatu sarana kebijakan (John Glasson, 1991:183) antara lain sebagai berikut :

1. Karena berbagai macam keuntungan pemusatan aktivitas ekonomi (*aglomerasi*), teori ini cenderung menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan.
2. Dari segi anggaran belanja negara, pemusatan-pemusatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar.
3. *Spread effect* yang ditimbulkan oleh pusat pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah yang sedang merosot.

Dan BAPPENAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengenai Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan, membuat sebuah *master plan* empat kawasan andalan yaitu Kawasan Andalan Rengat Kuala Enok, Kawasan Andalan Priangan Timur, Kawasan Andalan Malang dan Kawasan Andalan Manado. Untuk Kawasan Andalan Malang, terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pusat pelayanan perdagangan, industri pengolahan, dan pusat pelayanan utama dan pemasaran adalah Kota Malang, dengan kata lain, Kota Malang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan ekonomi dalam Kawasan Andalan Malang. Sedangkan Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagai daerah belakang atau *Hinterland* yang menyuplai bahan baku utama disamping sebagai daerah pemasaran dan pelayanan juga dalam skala yang lebih kecil.

Kawasan Andalan dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dalam era otonomi seperti masalah kesenjangan dan iklim

globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, dengan tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Kawasan Andalan adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalan juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Dibutuhkan model-model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan.

Tabel 1.1 : Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan
Kedungkandang	39,89	2,72	3.767
Klojen	8,83	-1,96	13.307
Blimbing	17,77	0,76	8.923
Lowokwaru	22,60	1,98	7.459

Sukun	20,97	0,67	7.730
Total	110,06	0,86	6.878

Sumber: Kota Malang Dalam Angka Tahun 2007

Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan perekonomian dalam Kawasan Andalan Malang termasuk dalam kategori kota besar. Pengkategorian kota ini berdasarkan besarnya (jumlah penduduk) yaitu sebesar 756. 982 jiwa hasil dari sensus penduduk tahun 2000. Menurut Raharjo (2005), sebuah kota masuk dalam kategori kota besar apabila jumlah penduduknya berkisar antara 750.000 jiwa sampai 1.250.000 jiwa. Sebagai kota besar, Kota Malang terbagi menjadi lima kecamatan yang mendukungnya yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru serta Kecamatan Sukun. Kecamatan Klojen mempunyai kepadatan penduduk tertinggi karena berada di pusat kota dengan segala kemudahan fasilitas di dalamnya lebih padat dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Padahal laju pertumbuhan penduduknya berbanding negatif dengan kepadatan penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Klojen mempunyai daya tarik yang membuat masyarakat lebih memilih tinggal di kecamatan ini. Sangatlah wajar karena di Kecamatan Klojen segala fasilitas sarana dan prasarana lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kecamatan Blimbing dan Sukun secara berturut-turut memilki kepadatan dibawah Kecamatan Klojen. Ini karena kedua kecamatan tersebut merupakan daerah padat industri. Adanya berbagai macam industri pada kedua kecamatan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk memilih lokasi tempat tinggal disamping sarana prasarana yang tersedia. Hal ini berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2000.

Jumlah penduduk yang datang mencapai 20.997 orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 22.789 pada tahun 2007. Menurut hasil proyeksi penduduk tahun 2007, penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 408.485 jiwa dengan rasio penduduk 99,87 %. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007 yang dilakukan BPS Kota Malang, penduduk dengan tingkat pengeluaran di atas Rp. 500.000 paling mendominasi yaitu 37.50% dari total penduduk. 36.96% berada pada kelompok berpengeluaran antara Rp. 300.000-499.999 sedang sisanya melakukan konsumsi dibawah nominal Rp. 299.999. Ini menandakan bahwa menurut konsumsi atau pengeluaran penduduk maka penduduk Kota Malang tergolong penduduk golongan menengah.

Tabel 1.2 : Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	96	10	106
SMP	364	246	610
SMU	7.038	5.554	12.592
Diploma	1.525	1.641	3.166
Sarjana	6.488	6.566	13.054
Jumlah	15.511	14.017	29.528

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang Tahun 2007

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang di tahun 2007 yang terdaftar sebanyak 29.528 jiwa yang belum mendapat pekerjaan dengan pencari kerja terbanyak berada di tingkat pendidikan sebagai sarjana (13.054), SMU (12.592), Diploma (3.166), SMP (610) dan SD (106).. Besarnya pencari kerja ini

diikuti pula oleh perkembangan industri baik sedang maupun besar. Untuk industri sedang, sampai pada tahun 2007 tercatat 156 industri yang tersebar di Kota Malang dan dominasi berada di kecamatan Blimbing dan Sukun. Sedangkan industri besar tercatat sebanyak 41 industri dan mayoritas berada di kecamatan Sukun.

Tabel 1.3 : Jumlah Industri Menurut Kategori dan Kecamatan 2007

No.	Kecamatan	Kategori		Jumlah
		Industri Besar	Industri Sedang	
1	Kedungkandang	22	3	25
2	Sukun	44	22	66
3	Klojen	16	6	22
4	Blimbing	49	7	56
5	Lowokwaru	25	3	28
Jumlah		156	41	197

Sumber: BPS Kota Malang

Secara sektoral, pertumbuhan tetap digerakkan oleh pertumbuhan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Peningkatan kapasitas produksi pada kedua sektor ini tidak terlepas dari peningkatan permintaan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan omset dan produksi kedua sektor tersebut. Sumbangan sektoral terhadap PDRB dalam Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 : Sumbangan Sektoral PDRB Kota Malang

Sektor Dominan	Pertumbuhan Tertinggi	Penyumbang pertumbuhan tertinggi
Perdagangan, Hotel dan	Perdagangan, Hotel dan	Perdagangan, Hotel dan

Restoran	Restoran	Restoran serta Industri
----------	----------	-------------------------

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kerja BI Malang, semester I-2008

Bidang pendidikan juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah karena investasi manusia sangatlah penting dalam pembangunan. Untuk tingkatan terakhir dari program Wajib Belajar 9 Tahun yaitu SMP, terdapat banyak sekolah di Kota Malang. Pun ratio antara guru dan murid juga seimbang, dengan demikian proses belajar mengajar dapat berjalan optimal sehingga penyerapan ilmu dapat diperdalam dan diperbanyak mengingat input yang tersedia cukup memadai. Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Blimbing dan Sukun merupakan kandidat diposisi kedua dan ketiga. Dan untuk bidang pendidikan pun mereka masih menempati posisi yang sama. Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan pada umumnya dan investasi serta perbaikan SDM pada khususnya. Pada Kecamatan Sukun, terdapat 3 puskesmas dan satu rumah sakit sedangkan Kecamatan Blimbing hanya melengkapi wilayahnya dengan 3 puskesmas saja.

Tabel 1.5 : Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta Kota Malang Tahun 2007

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Ratio Murid dengan Guru
1	Kedungkandang	14	4.650	333	14
2	Sukun	17	5.384	409	13
3	Klojen	24	11.312	798	14
4	Blimbing	19	6.198	431	14
5	Lowokwaru	16	5.995	458	13

	Jumlah	90	33.539	2.429	14
--	--------	----	--------	-------	----

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang

Kabupaten Malang yang kedudukannya sebagai *hinterland* bagi Kota Malang dalam konteks Kawasan Andalan yang dicetuskan BAPPENAS, memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus dan selalu positif. Kabupaten ini merupakan satu kabupaten yang tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang yang menduduki peringkat enam dari 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. Kontribusi sektoral pada PDRB di dominasi oleh sektor tersier sebesar kurang lebih 40% dari total PDRB. Porsi sektor primer sebesar 25% dan sektor sekunder 35%.

Tabel 1.6 : Sumbangan Sektoral Terhadap PDRB Kab.Malang

Sektor Dominan	Pertumbuhan Tertinggi	Penyumbang Pertumbuhan Tertinggi
Pertanian	Bangunan	Perdagangan, Hotel dan Restoran Pertanian

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kerja BI Malang, semester I-2008

Untuk dapat melihat gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang terintegrasi dalam 4 neraca pokok yaitu Neraca Produksi, Neraca Konsumsi, Neraca Akumulasi dan Neraca Transaksi Luar Negeri. Gambaran ekonomi yang sampai saat ini dapat dihitung pada tingkat wilayah Kabupaten Malang adalah sebagian dari neraca produksi yaitu gambaran mengenai besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan agar lebih mencerminkan pertumbuhan PDRB

berdasarkan kuantitas produknya bukan karena *price* atau harganya. Berikut adalah perkembangan PDRB ADHK2000 Kabupaten Malang :

Tabel 1.7 : PDRB ADHK2000 Kabupaten Malang Tahun 2002-2007

(milyar rupiah)

No.	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007
I	Pertanian	3.049,19	3.172,28	3.354,28	3.498,09	3.648,21	3.804,36
II	Pertambangan dan Penggalian	232,04	240,02	259,34	283,25	305,38	329,47
III	Industri Pengolahan	1.550,79	1.600,97	1.741,21	1.859,43	2.014,99	2.207,20
IV	Listrik dan Air Bersih	152,80	153,24	163,14	173,38	182,61	189,64
V	Bangunan	134,13	139,24	151,87	164,00	178,99	197,77
VI	PHR	2.183,99	2.325,02	2.445,01	2.585,66	2.754,65	2.949,00
No.	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006	2007
VII	Pengangkutan dan Komunikasi	447,79	461,12	479,55	496,40	520,59	548,52
VIII	Keuangan dan Persewaan	381,78	390,89	405,48	425,39	451,44	474,64
IX	Jasa-jasa	1.405,29	1.441,05	1.466,56	1.501,46	1.561,08	1.624,59
Jml	Dengan Migas	9.537,80	9.923,82	10.466,5	10.987,1	11.617,9	12.325,2

Sumber : PDRB Kabupaten Malang Tahun 2002-2007

Pemerintah Kabupaten Malang membagi wilayahnya ke dalam delapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Pembentukan SSWP ini dimaksudkan untuk memudahkan Pemda melakukan fungsinya yaitu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan sehingga diharapkan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang dapat merata, terpadu (lintas sektor) dan tepat sasaran. Salah satu SSWP yang memiliki pertumbuhan paling menonjol adalah SSWP II Lingkaran Kota Malang. Selain PDRB ADHK tertinggi sehingga

menyumbang 28,25% dari total PDRB Kabupaten, SSWP ini juga memiliki ciri yang sama dengan Kota Malang yaitu besarnya peranan sektor tersier dalam perekonomian. Indikator kesejahteraan sosial masyarakat yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, menempatkan IPM Kabupaten Malang di atas IPM Propinsi. Pada SSPW II Lingkar Kota Malang, IPM Kecamatan Singosari menempati posisi atas dan kecamatan ini menduduki peringkat nomor 2 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Sedangkan kecamatan Wagir yang jaraknya lebih dekat dengan Kota Malang, IPMnya menempati posisi 7 pada SSPW II. Seharusnya dengan jarak yang relatif pendek dan dekat dengan lokasi industri di Kecamatan Sukun, IPM Kecamatan Wagir bisa digenjot untuk terus naik. Begitu juga dengan Kecamatan Pakis. Sentra industri SSWP II berada di kecamatan ini. Jarak dengan Kota Malang juga tidak begitu jauh namun IPMnya berada pada posisi 5.

Tabel 1.8 : IPM per Kecamatan Wilayah SSWP II Lingkar Kota Malang 2008

No.	Kecamatan	AHH	Pendidikan	PPP	Peringkat IPM
1	Dau	69,33	74,18	64,02	3
2	Karangploso	74,83	72,79	63,98	2
3	Singosari	75,00	78,37	64,83	1
4	Pakis	68,00	71,80	63,97	5
5	Tajinan	64,27	70,57	57,61	8
6	Bululawang	71,00	74,09	57,26	6
7	Pakisaji	71,67	75,76	58,43	4
8	Wagir	68,33	71,45	57,61	7

Sumber : Bapekab Kabupaten Malang (data diolah)

SSWP II Lingkar Kota Malang memang berpotensi dalam banyak bidang. Untuk potensi sektoral yaitu sektor primer, potensinya ada pada subsektor tanaman pangan. Sedang untuk sektor sekunder, subsektor yang potensial bagi SSWP II adalah industri semen dan bahan galian, industri kayu, industri tekstil dan kulit, industri makanan, industri alat angkut dan mesin, dan industri kertas dan cetak. Dan untuk sektor tersier, potensinya berada pada subsektor jasa dan angkutan rel, jasa pos dan telekomunikasi, lembaga keuangan non bank, jasa hiburan dan kebudayaan. SSWP ini merupakan wilayah yang paling sedikit memiliki keunggulan pada sektor tersier. Hal ini disebabkan aktivitas jasa perdagangan terpusat pada Kota Malang, atau dengan kata lain kebutuhan tersier masyarakat wilayah ini dipenuhi oleh sarana dan prasarana yang berada di Kota Malang, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor tersier relatif terhambat, beda dengan wilayah SSWP III Lawang dan SSWP V Kepanjen dan sekitarnya yang notabene merupakan wilayah yang aktivitas ekonominya berkembang cepat. Fenomena ini bisa dikatakan sebagai *backwash effect* dari adanya pusat pertumbuhan.

Bapekab Kabupaten Malang dalam RPJM Kabupaten Malang tahun 2006-2010 menyatakan bahwa kinerja sektor ekonomi pada SSWP II berdasarkan analisis Klassen Typologi tergolong daerah maju dan cepat tumbuh. Aktivitas ekonomi SSWP II mendapat imbas eksternalitas pertumbuhan Kota Malang, akibat daya dukung lahan Kota Malang yang tidak mampu menampung perkembangan pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor sekunder dan tersier yang pada akhirnya mau tidak mau meluas ke pinggir kota dan melebar ke wilayah Lingkar Kota Malang, contohnya berdirinya industri baru di Pakis, yaitu kecamatan yang berbatasan dengan kawasan industri Kota Malang (Kecamatan Blimbing), perumahan, perluasan jasa pendidikan dan lembaga keuangan non bank. Untuk Tingkat Upah

Minimum Kabupaten, Kabupaten Malang juga menyesuaikan dengan UMK Kota Malang seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.9 : UMK Kota dan Kabupaten Malang

Wilayah	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Kota Malang	497.100	548.000	575.300	652.000	745.109	802.941
Kab.Malang	493.250	548.000	575.300	652.000	743.250	802.000

Sumber : Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kerja BI Malang, semester I-2008

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang sebesar 0.67 dengan kepadatan rata-rata penduduk 754/Km². Dan secara sektoral, tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan mendominasi dari sektor-sektor lainnya yaitu sebanyak 35.039 pekerja dari total 54.872 dari data yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten. Dan dari penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Menurut Badan Hukum Tahun 2007, kecamatan Pakis merupakan kecamatan yang memiliki lebih dari 100 perusahaan dengan Badan Hukum dan posisi kedua adalah kecamatan Singosari sebanyak 96 perusahaan. Ini merupakan efek aglomerasi dari penetapan kawasan Timur Laut Kota Malang sebagai kawasan industri dimana batas wilayah daerah ini adalah kecamatan Pakis dan Singosari.

Tabel 1.10 : Jarak Antar Kecamatan SSWP II Dengan Kota Malang

No.	Kecamatan	Jarak menuju Kota Malang
1.	Singosari	10 Km
2.	Pakis	14 Km
3.	Tajinan	18 Km
4.	Bululawang	11 Km
5.	Pakisaji	11 Km

6.	Wagir	8 Km
7.	Dau	12 Km
8.	Karangploso	14 Km

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka 2008 (diolah)

Berdasarkan jarak tempuh menuju pusat pertumbuhan yaitu Kota Malang, Wagir merupakan kecamatan yang terdekat dan Tajinan adalah kecamatan yang mempunyai jarak tempuh terjauh dari pusat pertumbuhan. Dengan kisaran jarak antara 8-18 Km, apabila kondisi prasarana fisik (infrastruktur dasar) berupa jalan yang baik kondisinya, maka penetrasi dari pusat pertumbuhan diharapkan lebih besar daripada kecamatan-kecamatan lain dalam SSWP lainnya. Karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh J.W Fedderke, P. Perkins dan J.M Luiz di Afrika Selatan mengenai *Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*, adalah positif. Artinya apabila infrastruktur dalam kondisi yang mendukung (baik) maka hal itu dapat menambah output produksi yang dalam jangka panjang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan.

Dengan Indeks Interaksi, akan diteliti sejauh mana jarak mempengaruhi interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang dan tentu saja selain jarak masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti yang telah dijabarkan oleh ILO (*International Labour Organization*) dalam buku panduannya mengenai IRAP, yaitu pengadaan akses-akses dasar rumah tangga dimulai dari tingkatan bawah (desa) yang nantinya diharapkan terdapat pemerataan kesejahteraan dan produktivitas penduduk pedesaan yang mampu mengangkat perekonomian dan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten pun mulai giat menyelenggarakan akses-akses dasar tersebut hingga tingkatan administrasi terbawah dengan tujuan pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Yang diharapkan dengan tumbuhnya perhatian sampai ke tingkatan terbawah akan menggugah tidak saja penduduk setempat selaku *man power* tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait untuk mendorong pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam Raperda Kabupaten Malang, pemerintah menyebutkan telah ada peningkatan akses telekomunikasi hingga tingkat terendah demi mendukung usaha rakyat. Meskipun masih ada saja kendala, namun pemerintah optimis akan adanya *spread effect* dari pusat pertumbuhan sampai pada lapisan bawah, dan bukannya malah menimbulkan *back wash effect* yang selama ini banyak ditakutkan oleh berbagai kalangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan dan Kabupaten Malang sebagai daerah belakang. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Peranan Pusat Pertumbuhan Terhadap Daerah Belakang (*Hinterland*) : Aplikasi Teori Interaksi (Studi Kasus Kota Malang dan SSWP II Kabupaten Malang)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peranan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan, dibidang pendidikan dan kesehatan serta daya serap tenaga kerja Kabupaten Malang yang diwakili oleh SSWP II?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui dan menganalisis peranan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan, dibidang pendidikan dan kesehatan serta daya serap tenaga kerja Kabupaten Malang yang diwakili oleh SSWP II.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti/mahasiswa dapat digunakan sebagai penerapan ilmu selama di perkuliahan.
- b. Bagi pemerintah/lembaga non-pemerintah dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam implementasi berbagai kebijakan yang terkait.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama dapat digunakan sebagai referensi/sumbangan pemikiran bagi penelitian yang dikerjakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pusat Pertumbuhan

2.1.1 Definisi

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang menggambarkan adanya keanekaragaman baik sumber daya alam, budaya, iklim, potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang terdapat di masing-masing daerah, adalah sangat sesuai apabila konsep pembangunan wilayah yang diterapkan bertumpu pada teori pusat pertumbuhan dengan tidak mengadakan yang satu dan meniadakan yang lain antara pertumbuhan dan keadilan ekonomi.

Wilayah polarisasi didefinisikan sebagai perangkat kota-kota dengan daerah-daerah disekitarnya yang mengadakan pertukaran lebih banyak dengan metropolis tingkat regional dari pada kota-kota lainnya yang mempunyai orde yang sama di suatu negara. Justifikasi dari pengertian wilayah polarisasi adalah bersifat empirik. Daerah-daerah disekitar pusat mempunyai keterhubungan dan ketergantungan yang erat dengan pusatnya. Jadi wilayah polarisasi berarti tidak autarkis atau bersifat terintegrasi antara pusat dengan daerah komplementernya.

Teori lokasi klasik tidak berlaku sempurna karena beranggapan bahwa semua kegiatan berlangsung diatas permukaan yang sama, perbedaan geografis dianggap tidak ada, fasilitas transportasi terdapat ke segala jurusan, bahan mentah industri, pengetahuan teknis dan kesempatan produksi adalah seragam. Akibat dari ketidaksempurnaan itu, timbul pemikiran baru yaitu teori Kutub Pertumbuhan. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh pencetusnya yaitu Perroux, seorang ahli ekonomi

Perancis. Ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua wilayah, akan tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya (dalam Rahardjo A, 2005).

Mengikuti pendapat Perroux tersebut, Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat pertumbuhan. Dan pandangan Perroux sendiri juga konsisten mengenai proses pertumbuhan yang sesuai dengan Teori Tata Ruang Ekonomi, dimana industri pendorong dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya. Menurut Baughet, teman sekolah Perroux yang menuliskan bahwa pertumbuhan daerah-daerah yang kurang maju tergantung pada kegiatan-kegiatan dari unit-unit ekonomi yang besar. Dan Hoover mengemukakan juga pendapatnya bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi akan terjadi pada tempat apabila di tempat tersebut terdapat keuntungan lokasi yang terdiri dari *localization economics* dan *urbanization economics*.

Kebijakan pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk menimbulkan pemusatan investasi melalui penyediaan fasilitas pada suatu lokasi tertentu, fasilitas-fasilitas yang akan menciptakan keuntungan-keuntungan urbanisasi yang pada gilirannya menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya bagi industri atau usahanya. Keuntungan-keuntungan urbanisasi yang dimaksud meliputi berkembangnya pasar tenaga kerja perkotaan, kemudahan memasuki pasar yang lebih besar, adanya sektor swasta dan tersedianya berbagai macam jasa bagi penduduk dan industri. Jasa seperti itu meliputi tersedianya fasilitas pengangkutan, perdagangan yang menguntungkan dan berkembangnya aneka ragam fasilitas

sosial (John Glasson, 1991:172 dalam Asri, 1998). Dengan demikian jelas sudah bahwa pada prinsipnya pertumbuhan hanya akan terjadi pada daerah yang mempunyai keunggulan komparatif baik dari segi sumber daya alam, modal maupun manusia. Akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah mengakibatkan tingkat pertumbuhan juga akan berbeda.

Dan BAPPENAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 mengenai Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan, membuat sebuah *master plan* empat kawasan andalan yaitu Kawasan Andalan Rengat Kuala Enok, Kawasan Andalan Priangan Timur, Kawasan Andalan Malang dan Kawasan Andalan Manado. Untuk Kawasan Andalan Malang, terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Pusat pelayanan perdagangan, industri pengolahan, dan pusat pelayanan utama dan pemasaran adalah Kota Malang, dengan kata lain, Kota Malang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan ekonomi dalam Kawasan Andalan Malang. Sedangkan Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagai daerah belakang atau *Hinterland* yang menyuplai bahan baku utama disamping sebagai daerah pemasaran dan pelayanan juga dalam skala yang lebih kecil.

Kawasan Andalan sendiri menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 pasal 7 adalah satuan wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai sumber motor penggerak pengembangan wilayah nasional, sehingga Kawasan Andalan diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan menurut PP No.47 Tahun 1997 pasal 7 tentang RTRWN (Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional), merupakan kawasan yang dipilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan

ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional.

2.1.2 Teori Pusat Pertumbuhan

Menurut logika Aristoteles, segala sesuatu dapat diberi definisi mengenai batasan pengertian dari tiga sudut pandang, yaitu dari uraian materiil, menurut hubungan formal dan kaitan dengan sasaran atau tujuan akhir. Maka konsep wilayah atau region mempunyai tiga macam pengertian, yaitu wilayah homogen, wilayah polarisasi dan wilayah perencanaan/program. Wilayah homogen diartikan sebagai suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah-wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi sebuah wilayah tunggal apabila wilayah-wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang serupa. Wilayah polarisasi terdiri dari satuan wilayah yang heterogen. Sedangkan wilayah perencanaan sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kebijakan wilayah. Dia merupakan wilayah pengembangan, dimana program-program pembangunan dilaksanakan (Rahardjo A, 2005).

Pembagian wilayah menurut Friedman (dalam Rahardjo A, 2005) pembagian wilayah ada dua yaitu wilayah inti dan wilayah pingiran. Kemudian Friedman bersama W. Alonso membagi lagi wilayah menjadi empat yaitu :

1. *metropolitan regions*, biasa disebut sebagai *growth poles*. Biasanya merupakan wilayah kota-kota besar dengan segala fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan dan perbankan, serta

administrasi pemerintahan yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah-wilayah disekitarnya.

2. *development areas* atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua wilayah metropolitan atau lebih.
3. *frontier regions* adalah wilayah perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk, demikian pula tujuan-tujuan nasional baru seringkali mendorong pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah atau yang terletak diperbatasan.
4. *depressed regions*.

John Glasson, 1991:172 (Asri, 1998:3) berpendapat mengenai Teori Pusat Pertumbuhan tersebut. Menurutnya, teori tersebut dijabarkan secara induktif dari pengamatan atas proses perkembangan ekonomi. Perkembangan pusat pertumbuhan dalam ruang ekonomi adalah suatu usaha yang dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekangan dimensi-dimensi geografik. Teori ini mengembangkan suatu tipologi ruang ekonomi, yang terpenting diantaranya adalah tipologi ruang ekonomi sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan, dari tipologi tersebut dijabarkan konsep suatu kutub atau pusat sebagai vector dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Sebagai suatu ajang kekuatan-kekuatan, ruang ekonomi terdiri dari pusat-pusat atau kutub-kutub darimana memencar kekuatan sentrifugal dan kemana kekuatan-kekuatan sentripetal ditarik.

Ada beberapa sebab mengapa teori ini sangat menarik sebagai suatu sarana kebijakan (John Glasson, 1991:183) antara lain sebagai berikut :

4. Karena berbagai macam keuntungan pemusatan aktivitas ekonomi (aglomerasi), teori ini cenderung menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan.
5. Dari segi anggaran belanja negara, pemusatan-pemusatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar.
6. *Spread effect* yang ditimbulkan oleh pusat pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah yang sedang merosot.

Peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa pengembangan pada wilayah bersangkutan, maka keseluruhan usaha yang mengarah pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat dipandang sebagai penyebab berlangsungnya proses berkembangnya wilayah. Proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu yang disebut mekanisme pengembangan, pada mekanisme pengembangan dijumpai pula adanya satuan-satuan dan masing-masing disebut satuan mekanisme pengembangan (Poernomosidi, dalam Asri, 1998).

Untuk wilayah Kabupaten Malang, telah dibentuk SSWP atau Sub Satuan Wilayah Pengembangan sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal pertumbuhan dan terpadu (lintas sektor) serta tepat sasaran. Karena pembentukan ini diharapkan mampu untuk memudahkan Pemda dalam melakukan fungsinya yaitu dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Pemerintah membagi wilayah Kabupaten Malang ke dalam delapan SSWP antara lain :

1. SSWP I, Ngantang dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon dengan letak *node* di Kecamatan Ngantang.
2. SSWP II, Lingkaran Kota Malang yang meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Singosari, Pakis, Tajinan, Bululawang, Pakisaji dan Wagir dengan letak *node* Kota Malang.
3. SSWP III, Lawang yang meliputi wilayah Kecamatan Lawang saja sehingga letak *node* juga Kecamatan Lawang.
4. SSWP IV, Tumpang dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Jabung, Tumpang, Poncokusumo dan Wajak dengan letak *node* pada Kecamatan Tumpang.
5. SSWP V, Kepanjen dan sekitarnya dengan wilayah jangkauan Kecamatan Wonosari, Ngajum, Kepanjen, Kromengan, Sumberpucung, Pagak dan Kalipare dimana *node* berada pada Kecamatan Kepanjen.
6. SSWP VI, Donomulyo yang meliputi Kecamatan Donomulyo itu sendiri yang merangkap sebagai *node* dan *zone of influence*.
7. SSWP VII, Gondanglegi dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagelaran dan Gondanglegi dengan *node* Kecamatan Gondanglegi.
8. SSWP VIII, Dampit dan sekitarnya dengan *zone of influence* Kecamatan Turen, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading dan Sumbermanjing Wetan sedang *node* berada pada Kecamatan Dampit.

Sedang Kota Malang menerapkan konsep serupa dengan nama BWK atau Bagian Wilayah Kota. Terdapat enam Bagian Wilayah Kota (BWK) di Kota Malang, antara lain :

1. BWK Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen dimana *node* nya Pusat Kota yang berada di area Alun-alun dan sekitarnya.
2. BWK Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru dengan *node* kawasan sekitar Unisma dan Pasar Dinoyo.
3. BWK Malang Timur Laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Blimbing dengan *node* kawasan Pasar Blimbing.
4. BWK Malang Timur, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang dengan *node* kawasan Perumahan Sawojajar.
5. BWK Malang Tenggara, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang dengan *node* kawasan sekitar Pasar Gadang.
6. BWK Malang Barat, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan daerah *node* berada di kawasan Unmer dan Plaza Dieng.

Dan diantara dua wilayah administrasi yang berbeda tersebut, terdapat konsep serupa untuk menyeimbangkan pertumbuhan keduanya yaitu melalui Kawasan Andalan Malang.

2.1.3 Peranan/Manfaat Kota

Kota selalu mempunyai ikatan erat dengan wilayah yang mengelilingi. Dahulu kota-kota di zaman Yunani kuno tidak mengenal batas yang tegas secara ekonomis maupun politis antara darinya dengan pedesaan agraris (Daldjoeni, 1997). Ada kecenderungan kuat untuk melukiskan relasi antara kota dan daerah periferi. Para pengamat masyarakat melihat bahwa di negara yang sedang membangun, masyarakat sedang beralih menuju modernisasi. Andre Gunnar Frank

menyimpulkan bahwa kota-kota tidak mampu menyebarkan perkembangan akan tetapi justru meningkatkan tendensi keterbelakangan di pedesaan.

Menurut Robinson Tarigan (2005) hubungan antara kota dengan daerah belakangnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

Pertama, kota generatif, yaitu kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk daerah belakangnya sehingga bersifat saling menguntungkan/mengembangkan. Kedua, kota parasitif, yaitu kota yang tidak layak berfungsi untuk menolong daerah belakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di desa. Kota ini umumnya merupakan kota yang belum layak berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian tetapi juga perkotaan sekaligus. Ketiga, *enclave* atau tertutup, dimana perkembangan kota tidak disertai perkembangan daerah belakang karena kota menolak keberadaan daerah belakang.

Disekitar masing-masing pusat (*node*) terdapat lingkungan pengaruh (*zone of influence*) atau lingkungan tata ruang (*spatial field*) dimana terjadi bermacam-macam interaksi. Akan tetapi karena adanya kekuatan pengaruh dari jarak maka kepadatan arus pun akan semakin berkurang jika semakin jauh kita bergerak dari pusat pengontrol. Pada akhirnya, pada radius tertentu kepadatan tersebut akan berkurang sampai dibawah suatu tingkat kritis dan pada titik inilah letak batas terluar dari lingkungan tata ruang. Kenyataan bahwa arus ini berubah secara langsung bersama-sama dengan besarnya (atau daya tarik) pusat/*node* dan berubah secara terbalik bersama-sama dengan jarak dari pusat tersebut adalah merupakan landasan bagi model-model gravitasi, suatu teknik yang paling operasional bagi analisa polarisasi.

Kota besar (Rahardjo, 2005:186) melaksanakan fungsinya yaitu melayani daerah sekitarnya. Ada beberapa gejala utama sehubungan dengan peranan kota dalam pembangunan sistem spasial antara lain :

1. Kota mengatur keterkaitan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya melalui sistem *supply* dan pasar.
2. Pertumbuhan dan ekspansi kegiatan produktif di daerah perkotaan memberikan keuntungan kepada daerah-daerah pedesaan dalam bentuk bertambah besarnya pemasaran hasil pertanian.
3. Kota meneruskan dengan sistematis dorongan untuk melakukan kegiatan improvisasi dan inovasi ke daerah-daerah disekitarnya yang berada dalam jangkauan pelayanannya dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

Menurut Purnomosidi (Tarigan, K, 1998 : 84) bahwa peran pusat wilayah ditunjukkan oleh kedudukan pusat tersebut di dalam proses perkembangan wilayah, dimana pusat tersebut memberikan pancaran pengembangan ke wilayah sekitarnya. Pemancaran itu berlangsung pada dua saluran, yaitu pada tingkat nasional melalui sistem kota-kota dan pada tingkat regional melalui hubungan antara kota dengan *hinterlandnya*. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa Kota Malang berperan pada tingkat regional terhadap Kabupaten Malang. Peranan tersebut dapat dijabarkan secara general melalui kesempatan kerja dan juga perkembangan PDRB antar daerah. Menurut Said Rusli (1983) dengan menggunakan data sensus penduduk, jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam pengertian ini “kesempatan kerja” bukanlah “lapangan pekerjaan yang masih terbuka”, walaupun komponen yang terakhir ini akan menambah kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang. Memang

mungkin pada suatu waktu “lapangan pekerjaan yang masih terbuka” cukup banyak sementara jumlah pencari kerja (penganggur) banyak pula. Hal ini dapat terjadi karena kurang baiknya distribusi lapangan kerja yang masih terbuka itu bertalian dengan pola penyebaran penduduk, ataupun karena alasan lain seperti faktor keterampilan/keahlian dari para pencari kerja.

2.1.4 Ciri-ciri Wilayah Pusat Pertumbuhan

Robinson Tarigan (2005) berpendapat bahwa pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulus kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha itu.

Ciri-ciri kota sebagai pusat pertumbuhan ada empat yaitu : adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, ada efek pengganda, adanya konsentrasi geografis dan bersifat mendorong daerah belakangnya. Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam maupun keluar.

2.1.5 Aglomerasi

Saat ini pandangan ekonom tentang aglomerasi telah banyak mengalami perubahan. Aglomerasi ekonomi merupakan eksternalitas secara geografi dalam aktivitas perekonomian. Semakin besar aktivitas perekonomian di suatu lokasi tertentu akan membuat industri atau tenaga kerja akan berpindah ke lokasi tersebut karena aktivitas di lokasi itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 2001). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery dalam Kuncoro (2002) bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari skala ekonomi (*economy of scale*) disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*). (Mills dan Hamilton, 1989).

Pengertian aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. (Bradley and Gans, 1996). Aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Alfred Marshall yang menggunakan istilah *localized industry* sebagai pengganti dari istilah aglomerasi. Ahli ekonomi Hoover juga membuat klasifikasi aglomerasi menjadi 3 jenis (Isard, 1979) yaitu *large scale economies* merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, *localization economies* merupakan

keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi dan *urbanization economies* merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut.

Berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi yang lain, O'Sullivan (1996) membagi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi yaitu menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat dari produksi perusahaan lain meningkat. Aglomerasi lokalisasi merupakan pengelompokan berbagai perusahaan dalam industri yang sama di satu lokasi. Dengan berada di satu lokasi diharapkan produktivitasnya dapat meningkat melalui tersedianya input yang terspesialisasi, kualitas hidup tenaga kerja yang baik, dan tempat transaksi maupun tawar menawar yang terpadu. Aglomerasi ini akan menarik baik bagi pemakai *intermediate input* maupun pemasok *input* dan sering dihubungkan dengan *footloose* industri. Sedangkan aglomerasi urbanisasi ditandai dengan mengelompoknya berbagai macam industri pada lokasi yang sama. Ini akan menyebabkan juga terjadinya pemusatan tenaga kerja yang mempunyai keahlian beragam dan dengan demikian akan mudah terjadinya pelimpahan pengetahuan (*knowledge spillover*). Industri akan memanfaatkan skala ekonomi dalam pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa studi yang menambah pengelompokan ini dengan aglomerasi spesialisasi (Bradley and Gans, 1998). Spesialisasi ini berhubungan dengan komposisi sektoral dalam perekonomian. Los Angeles, misalnya, mempunyai aglomerasi spesialisasi dalam bidang pertahanan, elektronika, dan multimedia. Sedangkan Yogyakarta mempunyai aglomerasi spesialisasi dalam bidang pariwisata dan pendidikan. (Agus Sugiyono, 2001)

Dalam Didi Nuryadin, dkk (2007) Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah dimana potensi dan kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Kota umumnya menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil dalam jumlah yang jauh lebih tinggi di banding perdesaan (Malecki, 1991). Teori Neo Klasik berargumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. (Kuncoro, 2002). Asumsi yang digunakan oleh Teori Neo-Klasik adalah *constant return to scale* dan persaingan sempurna. Alfred Weber dikenal sebagai pendiri Teori Lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, lokasi dan geografi dari kegiatan ekonomi. Minimisasi biaya yang dikombinasikan dengan bobot input-input yang berbeda dari perusahaan dan industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan. Weber secara eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, dan keterkaitan ke depan dan ke belakang. Konsep ini menjadi dasar berkembangnya Teori Perdagangan Regional baru. Dalam sistem perkotaan Teori Neo Klasik, mengasumsikan adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripetal aglomerasi disebut sebagai ekonomi eksternal murni. (Krugman, 1998). Kekuatan sentripetal muncul dari kebutuhan untuk pulang-pergi (*commute*) ke pusat bisnis utama dalam masing-masing kota yang menyebabkan suatu gradien sewa tanah dalam masing-masing kota. Menurut Krugman (1998), keterbatasan Teori Neo Klasik diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (*blackbox*). Disamping itu Sistem

Perkotaan Neo Klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya.

Dalam penelitian ini, kawasan industry di daerah Kecamatan Blimbing dan Sukun merupakan aglomerasi industry berjenis aglomerasi urbanisasi. Dimana aglomerasi jenis ini ditandai dengan adanya pengelompokan berbagai jenis industry pada lokasi yang sama. Industry pada kedua daerah tersebut tergolong dalam kategori industry besar, sedang dan juga kecil dengan hasil atau produk yang bermacam-macam juga. Mulai industry makanan, tekstil, manufaktur dan sebagainya.

2.2 Daerah Belakang (*Hinterland*)

2.2.1 Definisi

Mengacu pada *master plan* BAPPENAS, daerah belakang (*hinterland*) adalah daerah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan dimana dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan. Secara konseptual antara wilayah inti dan wilayah *hinterland* merupakan suatu wilayah saling terkait secara sinergis. Wilayah inti berfungsi mendorong dan memfasilitasi perkembangan wilayah *hinterland* dengan menyediakan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan, sedang wilayah *hinterland* lebih berfungsi sebagai kawasan produksi yang bisa menjadi suplai bagi wilayah lain.

Menurut Rustiadi, dkk. (2006) konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan suatu sel hidup yang mempunyai plasma dan inti. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/permukiman sedangkan plasma adalah daerah belakang (*hinterland*) yang mempunyai sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Pusat wilayah berfungsi sebagai : (1) tempat terkonsentrasi

penduduk (permukiman), (2) pasar bagi komoditi-komoditi pertanian maupun industri, (3) pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*, dan (4) lokasi pemusatan industri. Sedangkan *hinterland* berfungsi sebagai : (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah atau bahan baku, (2) pemasok tenaga kerja, (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri.

2.3 Teori Interaksi

Menurut Bintarto (1983) interaksi berarti terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan.

Arti "*interaction*" menurut Yoseph S. Roucek (dalam Bintarto, 1983) adalah sebagai berikut :

"interaction is a process in which the responses of each partly become, successively, stimula for the responses of the other. It is a reciprocal process in which one party isinfluenced by the other behavior. People influence each other behavior through contact direct speaking, listening, indirect writing."

Yang intinya dapat diartikan sebagai berikut :

"interaksi merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang di dengar atau melalui surat kabar."

Pembagian *zone* interaksi ada lima yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 : Pembagian Zona Interaksi

No.	Zone	Keterangan
1	<i>City</i>	Diidentikkan dengan kota
2	<i>Sub Urban</i>	Suatu area yang lokasinya dekat dengan pusat kota dengan luas yang mencakup daerah penglaju atau <i>commuters</i> .
3	<i>Sub Urban Fringe</i>	Suatu area yang melingkari Sub Urban dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa.
4	<i>Urban Fringe</i>	Semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota.
5	<i>Rural Urban Fringe</i>	Suatu jalur daerah terletak antara daerah kota dan daerah desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran.
6	<i>Rural</i>	Daerah pedesaan

Sumber : Bintarto, 1989 hal : 66-67

Interaksi antara kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lainnya sebagai produsen dan konsumen beserta barang-barang yang diperlukan, menunjukkan adanya gerakan (*movement*). Produsen suatu barang pada umumnya terletak di sebuah tempat tertentu dalam ruang geografi, sedang para pelanggannya tersebar dengan pelbagai jarak disekitar produsen. Sebelum interaksi terjadi harus

terjadi gerakan terlebih dahulu. Frekuensi gerakan antara produsen dan konsumen dipengaruhi oleh prinsip optimasi, oleh persyaratan *threshold* atau oleh saingan-saingan yang ada dan jarak. *Threshold* adalah jumlah minimum penduduk yang diperlukan, dalam hal ini, pemakai yang dapat dipakai dasar perhitungan untuk mendirikan sesuatu unit usaha (Toyne & Newby, 1972:137-171 dalam Bintarto, 1983)

Efek jarak terhadap gerakan ini lebih dikenal masyarakat secara intuisi untuk segala tingkat perkembangan. Pelbagai interaksi menimbulkan pelbagai lapangan interaksi. Luas sempitnya areal interaksi tergantung pada :

1. tinggi rendahnya *threshold*
2. padat tidaknya suatu kawasan
3. perbedaan kultur dan perbedaan daya beli penduduk, dan sebagainya.

Istilah model gravitasi tidak digunakan hingga tahun 1920-an tetapi sebenarnya ahli geografi di abad ke-19 telah menggunakan hukum Sir Isaac Newton tentang Gravitasi (1687) yang mengatakan bahwa dua benda akan saling tarik menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak pangkat dua. Konsep gravitasi dalam studi tentang perdagangan telah diperkenalkan oleh W.J. Reilly di tahun 1929. (Bintarto, 1979: 80)

Dalam analisa gravitasi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik (interaksi) antar daerah (Warpani Soewarjoko, dalam Asri 1998). Indeks gravitasi ini dihitung sebagai berikut (R. Bintarto dan Hadisumarmo S., 1982 : 80) :

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{J_{12}^b}$$

Dimana :

I_{12} = interaksi antara wilayah 1 dan 2

P_1 = jumlah penduduk wilayah 1

P_2 = jumlah penduduk wilayah 2

J_{12} = jarak antara wilayah 1 dan 2

a = suatu konstanta empiric dimana dalam hal ini dianggap nilainya adalah satu

b = suatu eksponen jarak yang nilainya adalah dua

Untuk nilai eksponen jarak yang bernilai dua, hal itu merupakan nilai rata-rata dari range eksponen yaitu 0,4 dan 3,3. Apabila relief atau topografi antara dua tempat itu datar dan daerah geraknya luas, dipergunakan pangkat 0,4 dan apabila topografinya kasar dan daerah geraknya sempit dipergunakan angka 3,3 untuk pangkatnya.

Dengan menggunakan model gravitasi, maka akan dapat diukur interaksi diantara dua region (daerah). Dalam hal ini Edward Ullman telah mensistematisasikan pengertian interaksi keruangan yang didasarkan pada tiga faktor, yaitu region yang saling melengkapi (*region complementarity*), kesempatan berinteraksi dan kemudahan transfer.

Yang dimaksud dengan komplementaritas region adalah adanya region yang berbeda kemampuan sumber dayanya, di satu pihak surplus dan di lain pihak defisit. Kondisi ini memberikan kemungkinan terjadinya pengaliran yang besar dan

menimbulkan interaksi keruangan yang tinggi intensitasnya. Sedangkan yang dimaksud kesempatan berinteraksi adalah kemungkinan perantara yang menghambat interaksi. Kemudian yang dimaksud dengan kemudahan transfer adalah fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu nyata, juga termasuk karakteristik yang khusus dari yang ditransfer. Komoditi tertentu yang dibutuhkan suatu daerah lain yang tertentu pula memiliki daya transfer yang tinggi (Nursid Sumaatmadja, 1981:52).

Beberapa dampak interaksi antara pusat dan *hinterland* dijabarkan dalam poin-poin dibawah ini oleh Bintarto (1983) :

1. adanya usaha-usaha atau kegiatan industri kecil dan kerajinan tangan di berbagai daerah *hinterland*.
2. masuknya tanaman perdagangan sebagai pengganti atau sebagai tanaman sela di antara tanaman perdagangan.
3. adanya perubahan pekerjaan atau mata pencaharian penduduk daerah *hinterland* sebagai akibat dari terbukanya daerah *hinterland* dan berkembangnya transportasi.
4. meningkatnya jumlah sekolah dan jumlah pelajar di daerah *hinterland*.
5. adanya puskesmas yang didirikan di daerah *hinterland*, perhatian bidang kesehatan balita dan program keluarga berencana dapat menimbulkan pelbagai pengaruh terhadap beberapa aspek demografi.
6. adanya kegiatan di bidang pengendalian lingkungan sehat telah banyak menghasilkan perbaikan mengenai masalah penyediaan air bersih dan masalah sampah.
7. intensifikasi di bidang pertanian sudah merupakan gejala umum di daerah *hinterland*.

8. penambahan, perbaikan dan pembuatan saluran irigasi telah nampak banyak dikerjakan di daerah *hinterland*. Hasilnya nampak dari produktivitas padi yang meningkat per hektarnya.
9. perubahan di bidang tata guna lahan telah banyak dialami oleh daerah *hinterland* dan juga pusat, lebih-lebih daerah tepian kota.
10. tumbuhnya pedagang kaki lima di berbagai sudut kota dan hunian liar akibat urbanisasi.

Model Gravitasi juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi penduduk di suatu tempat, yaitu dengan menggunakan rumus model gravitasi dan interaksi keruangan diatas yang telah dimodifikasi. Misalnya terdapat himpunan tempat-tempat (1, 2, 3, 4, . . . n) yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk ($P_1, P_2, P_3, P_4, . . . P_n$) maka potensi penduduk (PP) untuk tempat kesatu adalah sebagai berikut :

$$PP_1 = a \frac{P_1}{(2J_{1.})^b} + a \frac{P_2}{J_{12}^b} + \dots a \frac{P_n}{J_{1n}^b}$$

Potensi penduduk untuk tempat kedua adalah sebagai berikut :

$$PP_2 = a \frac{P_1}{J_{21}^b} + a \frac{P_2}{(2J_{2.})^b} + \dots a \frac{P_n}{J_{2n}^b}$$

Dan demikian seterusnya.

Dimana :

PP_1 = potensi penduduk di tempat 1

J_{12} = jarak antara tempat 1 dan 2

$J_{1.}$ = jarak antara tempat 1 dengan tempat terdekat dengan tempat 1

a = konstanta empiric

b = eksponen jarak yang mempunyai nilai sama dengan dua.

2.3.1 Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sebuah rumah tangga membutuhkan akses untuk mencapai fasilitas dan pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sosial ekonomi, sehingga mampu hidup lebih sejahtera dan produktif. Namun salah satu hambatan utama penduduk adalah terbatasnya akses untuk mencapai barang dan jasa yang dibutuhkan. Akses sendiri di definisikan sebagai tingkat kesulitan atau kemudahan penduduk untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Aksesibilitas merupakan faktor penentu dalam pembangunan perdesaan. Apapun bentuk program yang dirancang untuk memperbaiki kehidupan penduduk di perdesaan, akan sangat tergantung pada akses yang dimiliki terhadap berbagai fasilitas dan barang.

IRAP (*Integrated Rural Accessibility Planning*) yang dikeluarkan oleh ILO (*International Labour Organization*) berkembang dari sebuah pemahaman bahwa penduduk membutuhkan akses dasar yang mencakup sektor sebagai berikut :

1. pusat-pusat pemerintahan

Sebagian besar masyarakat pedesaan melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi pada pusat-pusat wilayah, baik desa, kecamatan dan kabupaten.

2. transportasi

Jalan memfasilitasi pembangunan pedesaan. Jalan baru akan meningkatkan transportasi dan berarti memecahkan masalah akses. Peningkatan akses pada akhirnya akan meningkatkan kondisi kehidupan dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan kondisi kehidupan dan pendapatan berarti pembangunan.

3. air bersih

Lebih dari 60% berat badan manusia terdiri dari air. Untuk mempertahankan fungsinya, tubuh memerlukan 2-10 liter air per hari tergantung aktivitasnya dan

cuaca. Air merupakan kebutuhan dasar dan harus tersedia sepanjang tahun. Sumber air bersih yang mudah di dapat adalah tujuan pembangunan. Penyediaan air bersih di pedesaan telah meningkatkan kesempatan hidup dan mengurangi kematian. Penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap air bersih.

4. energi listrik

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia telah menikmati fasilitas listrik yang dikelola oleh PLN. Waktu pelayanan mencapai 24 jam penuh namun demikian masih ada pemukiman penduduk yang belum bisa menikmati fasilitas listrik negara tersebut.

5. pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan dasar di zaman modern. Setiap orang bersekolah tidak hanya untuk memperoleh pendidikan formal tapi juga mengerti dan memahami sesuatu dengan lebih baik dan memperoleh kesempatan kerja yang layak. Memiliki rakyat yang berpendidikan tentunya sangat bermanfaat bagi negara, oleh karena itu pemerintah harus memastikan dan berusaha agar rakyat mendapatkan pendidikan yang cukup. IRAP lebih memberatkan unsur fisik dalam dunia pendidikan.

6. kesehatan

Pengembangan sistem pelayanan kesehatan terhadap ibu,anak serta masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesehatan. Angka kelahiran anak, yang merupakan salah satu indikator tingkat pelayanan kesehatan , telah meningkat beberapa dekade terakhir di hampir semua negara berkembang.

7. telekomunikasi

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan telekomunikasi sangat besar saat ini. Namun pelayanan tersebut belum dapat merata terutama di daerah pedesaan.

8. perekonomian (pasar)

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Keberadaan pasar di pedesaan dibutuhkan agar masyarakat dapat membeli kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus dapat pula menjadi tempat untuk menjual komoditas yang dihasilkan penduduk desa. Aktivitas pasar dianggap sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya transaksi di pasar diasumsikan sebagai pencerminan tingginya daya beli masyarakat yang disebabkan tingginya pendapatan mereka. Masalah yang diamati oleh IRAP mengenai akses ke pasar meliputi jumlah penduduk, prasarana dan sarana yang digunakan, jarak, waktu dan biaya perjalanan untuk mencapai pasar.

Sedangkan menurut Muljanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers dalam penelitiannya mengenai Pemenuhan Kebutuhan Pokok Golongan Berpenghasilan Rendah, mengemukakan bahwa kebutuhan pokok dapat mengarahkan pemerintah dalam menciptakan strategi pembangunan. Sehingga kita tidak menggantungkan diri pada *trickle down effect* yang menyertai pertumbuhan ekonomi tetapi lebih menekankan pada bagaimana secara langsung kebutuhan pokok seluruh penduduk dapat dipenuhi dengan menetapkan sasaran yang pasti dan mengarahkan produksi dan impor pada kebutuhan tersebut. Dari studi yang dilakukan ini, model kebutuhan pokok yang teridentifikasi sebagai kebutuhan dasar adalah sebagai berikut:

1. Makanan
2. Pakaian
3. Perumahan
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Kebersihan, Transportasi

7. Partisipasi Masyarakat

(Thee 1978, Soedjatmoko 1977, Sundoyo 1979, Evers 1979)

Untuk penelitian dalam skripsi ini, penulis hanya memasukkan 3 akses kebutuhan dasar masyarakat antara lain kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja. Ketiga akses tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperjelas dan memperkuat hasil analisis interaksi.

2.3.2 Kesejahteraan Masyarakat

Mengacu pada konsep IPM untuk mengukur tingkat pemerataan pembangunan maka digunakan indikator kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja yang diperuntukkan bagi masyarakat daerah belakang. Dengan terpenuhinya ketiga indikator tersebut, maka gambaran mengenai pembangunan sumber daya manusia dan kondisi kesejahteraannya dapat dilihat. Secara teori, antara kesehatan dan pendidikan saling terkait. Yang artinya semakin rendah pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Dua hal tersebut juga sulit diperlebar karena keterkaitannya dengan sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan. Sedangkan kesempatan kerja yang berdampak pada *income* masyarakat dan daya belinya, masih mampu dioptimalkan (Bapekab Kabupaten Malang, 2008)

Jadi disini, interaksi sosial ekonomi yang terjadi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang akan diteliti apakah memberikan kontribusi positif bagi daerah belakang ataukah tidak, dengan jalan melihat data arus masyarakat mengenai tiga bidang yang fundamental dalam menilai kesejahteraan masyarakat.

Karena dengan pendidikan dan kesehatan yang terjaga dengan baik, kesempatan kerja akan terbuka dan produktifitas meningkat. Dampaknya, *income* dan daya beli masyarakat juga naik sehingga secara umum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




UNIVERSITAS BRAWIJAYA



2. 4 Penelitian Terdahulu

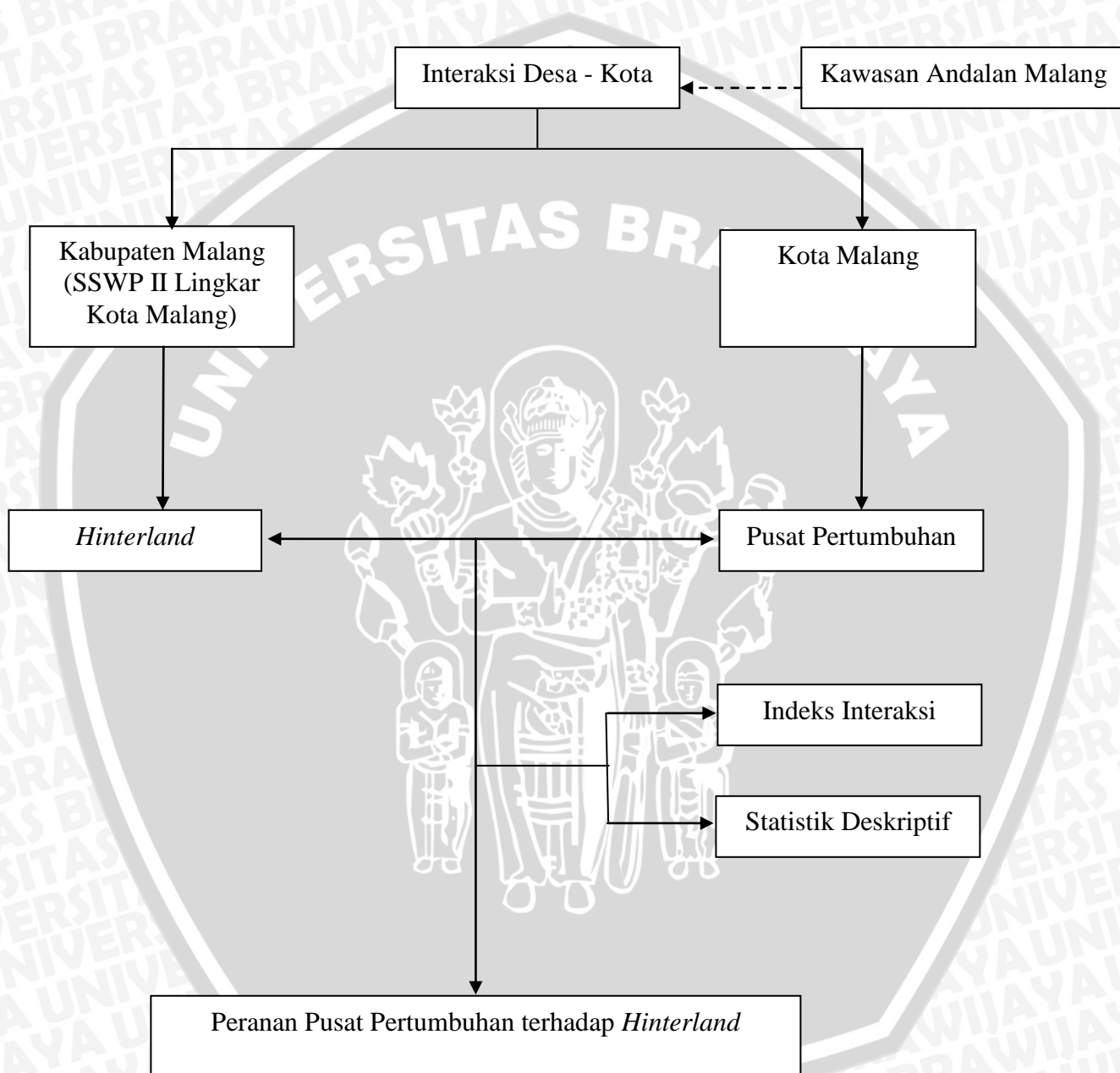
Table 2.2 : Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Variabel Dependen	Variable Independen	Alat Analisis	Hasil
1.	<i>Geography and economic growth</i>	John Luke Gallup and Jeffrey Sachs with Andrew D. Mellinger April 1998	<i>GDP or economic growth</i>	faktor produksi total, biaya transportasi dan proteksi pemerintah terhadap barang domestik. 	Harrod-Domar models	Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi total dan biaya transportasi. Untuk daerah pusat pertumbuhan, biaya transportasi lebih rendah daripada <i>hinterland</i> sehingga pada <i>hinterland</i> , biaya transportasi bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan untuk jangka panjang, variabel proteksi dari pemerintah berupa kenaikan harga impor akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Lanjutan

No	Judul	Peneliti	Variabel Dependen	Variable Independen	Alat Analisis	Hasil
2.	Studi Penentuan Desa-desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi DIY	Luthfi Muta'ali	Aksesibilitas lokasi, AHP dan sektor basis.	Jarak, transportasi, fasilitas sosial dan ekonomi	AHP dengan teknik Skalogram dan Sentralitas, LQ	<p>Dengan akses lokasi, dapat ditentukan peringkat masing-masing desa layak atau tidak menjadi pusat pertumbuhan. Dan dari teknik AHP kita dapat mengetahui fasilitas-fasilitas yang tersedia pada masing-masing desa tersebut. Yang terakhir dalam hal potensi desa, kita mengukur dengan LQ.</p> <p>Hasil secara umum, mayoritas desa di DIY masuk dalam kategori desa yang memiliki akses lokasi baik. Sebesar 27,04% desa DIY memiliki indeks sentralitas yang tinggi dan mayoritas memiliki sector basis pertanian, jasa dan pertambangan.</p>

2.5 Kerangka Pikir



Dari kerangka pikir tersebut, penulis mencoba menguraikan konsep yang mendasari pembuatan skripsi ini sebagai berikut :

Berangkat dari teori yaitu Teori Interaksi, dimana Interaksi yang dimaksud disini adalah terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya yang lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang dalam penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten Malang dimana sesuai dengan Kawasan Andalan Malang yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kota Malang sedang Kabupaten Malang berperan sebagai daerah penyangga atau daerah belakang atau *hinterland*. Untuk Kota Malang diwakili oleh BWK Malang Barat, BWK Malang Timur Laut dan BWK Timur (Kecamatan Sukun, Blimbing dan Kedungkandang) sedang Kabupaten diwakili oleh SSWP II Lingkar Kota Malang.

Alasan pengambilan tiga kecamatan di Kota Malang tersebut adalah karena Kecamatan Blimbing dan Sukun merupakan kawasan industri dan hal tersebut merupakan daya tarik bagi daerah belakang sedangkan Kecamatan Kedungkandang secara luas berbatasan dengan wilayah Kabupaten dengan fasilitas pendidikan yang mendukung dan banyak diminati masyarakat Kabupaten. Dan dengan alasan keuntungan aglomerasi urbanisasi, maka Kecamatan Pakis juga mengembangkan diri menjadi Kawasan Industri. Tidak

kurang dari 108 industri berada pada Kecamatan Pakis. Sedangkan Kecamatan Wagir adalah daerah belakang dengan jarak terdekat menuju Kota Malang. Namun, IPM Wagir berada pada posisi ketujuh dari delapan kecamatan yang mengelilingi Kota Malang. Ini merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti mengenai seberapa besar peran pusat pertumbuhan terhadap daerah belakang. Dengan menggunakan alat analisis berupa Indeks Interaksi akan dapat dihitung besarnya interaksi tersebut. Dan dengan data primer yang terkumpul akan dideskripsikan mengenai akses kebutuhan pokok masyarakat yang mendukung interaksi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan berupa indeks dan statistik deskriptif karena penggunaan data dengan penjabaran secara deskriptif tidak dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan secara general. Ini digunakan hanya untuk menjelaskan lebih detail mengenai fenomena-fenomena yang ada yang mendukung hasil perhitungan alat analisis utama yaitu Indeks Interaksi.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan pustaka, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

Kota Malang diduga memiliki peranan sebagai pusat pertumbuhan, dibidang pendidikan dan kesehatan serta daya serap tenaga kerja Kabupaten Malang yang diwakili oleh SSWP II.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam serangkaian proses penelitian ilmiah terdapat suatu segmen yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang disebut sebagai rancangan penelitian. Menurut Nazir (1999) suatu desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain riset merupakan rencana dan struktur penyelidikan untuk merinci hubungan-hubungan antara variabel dalam penelitian yang dibuat sedemikian rupa dan berguna untuk membantu peneliti dalam memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

Prosedur atau langkah-langkah penelitian menurut Moh. Nazir, 1985 (dalam Supardi, 2005) meliputi :

1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah
2. Mengadakan Studi Kepustakaan
3. Memformulasikan hipotesa
4. Menentukan model untuk menguji hipotesa
5. Mengumpulkan data
6. Menyusun, menganalisa dan memberikan interpretasi
7. Membuat generalisasi dan kesimpulan
8. Membuat laporan

3.1.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisa peranan Kota Malang sebagai pusat pertumbuhan yang diwakili oleh Kec. Blimbing, Kec. Sukun dan Kecamatan Kedungkandang terhadap daerah belakang (*hinterland*) yaitu Kabupaten Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II Lingkaran Kota Malang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif ini menurut Hadari Nawawi (1983) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.

Supardi (2005 : 28) mengemukakan bahwa secara garis besar, penelitian deskriptif ini merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat

menggambarkan secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara “apa adanya”.

Sedangkan menurut Whitney dalam Nazir, 2003, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jadi, peneliti dalam metode deskriptif bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan besar kecilnya peranan pusat pertumbuhan terhadap daerah belakangnya (*hinterland*) yang dicerminkan dari interaksi kedua wilayah bersangkutan, yang dapat diukur dengan angka-angka. Agar penggunaan metode ini dalam memecahkan masalah yang dihadapi dapat mencapai hasil guna yang tinggi, maka digunakan salah satu dari tiga bentuk metode deskriptif yaitu Survey Kemasyarakatan. Dimana menurut Hadari Nawawi (1985) penelitian dengan bentuk seperti ini sering juga disebut penelitian sosial yang maksudnya untuk mengungkap aspek atau beberapa aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini dikumpulkan data untuk mengambil kesimpulan tentang pendapat, keinginan, kebutuhan, kondisi dan lain-lain di dalam masyarakat mengenai aspek yang diselidiki. Sedangkan bidang yang akan diteliti meliputi situasi Geografis dan Ekonomi yang banyak pengaruhnya terhadap pola kehidupan masyarakat. Misalnya mengenai system dan pelaksanaan transportasi menuju fasilitas publik seperti dalam penelitian ini.

Dan penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui seberapa besar peranan pusat pertumbuhan terhadap daerah belakang (*hinterland*) dalam proses pemerataan pembangunan. Selanjutnya akan dikaji lebih mendalam melalui hasil survey mengenai akses kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dari wilayah yang lebih kecil (desa) yang mempengaruhi aksesibilitas penduduk yang menyebabkan interaksi dengan wilayah utama atau pusat pertumbuhan.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun sebagai pusat pertumbuhan dan Kabupaten Malang dalam penelitian ini adalah sebagai daerah belakang yaitu daerah Lingkar Kota Malang dengan menggunakan obyek penelitian PDRB ADHK 2005-2007, jarak antar wilayah, total penduduk berdasarkan sensus terakhir tahun 2000, jumlah sekolah, puskesmas dan industri pada tahun 2007. Penentuan daerah penelitian mengacu pada *Master Plan* BAPPENAS mengenai Pengembangan Kawasan Andalan Malang. Sedangkan sampel berupa pemilihan SMAN dan SMKN, puskesmas dan industri dilakukan secara random. Sebenarnya untuk penelitian deskriptif dengan teknik analisa statistik deskriptif tidak diperkenankan mengambil sampel namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, maka dipergunakan sampel dengan pertimbangan sampel tersebut cukup representatif atau mempunyai kemampuan untuk menggambarkan populasi dengan sebaik mungkin. Populasi disini adalah seluruh SMAN dan SMKN, puskesmas dan Industri yang berada pada lokasi penelitian. Waktu penelitian adalah tahun 2009 namun ada beberapa data sekunder yang tersedia dengan tahun dibawah 2009.

3.1.3 Metode Pengumpulan Data

3.1.3.1 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang dipergunakan adalah data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Data yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini terbatas pada data PDRB ADHK 2005-2007, jarak antar wilayah, total penduduk berdasarkan sensus terakhir tahun 2000, jumlah sekolah, puskesmas dan industri pada tahun 2007. Selain data kuantitatif juga digunakan data Kualitatif baik yang murni maupun sudah ditransformasi ke dalam data Kuantitatif dengan memberikan symbol angka atau dengan menghitung frekuensi/jumlahnya secara terpisah satu dengan yang lain. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lapangan yang dilakukan peneliti pada tahun 2009. Sedangkan data sekunder yang menurut Supangat (2007) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari obyek yang diteliti, dimana biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari obyek secara individual (responden) maupun suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna, bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, BAPPEDA Kab. Malang serta melalui studi pustaka dan data-data yang diambil merupakan data yang berjenis *cross section*.

3.1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada dua. yaitu pertama adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari, memahami, mengklasifikasi dan

menggunakan sumber data sekunder yang telah diperoleh dari organisasi atau badan tertentu maupun dari literature, artikel, jurnal maupun situs-situs internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan. Data-data sekunder tersebut terlebih dahulu diolah dan diambil sesuai dengan kebutuhan dalam estimasi dan perhitungan angka indeks. Sedang teknik kedua survey kemasyarakatan untuk memperoleh data primer dan dengan penyebaran angket. Data-data primer yang di dapat akan diolah dan diklasifikasi menurut kriteria yang telah ditetapkan. Setelah selesai dilakukan pengklasifikasian maka hasil akan disajikan dalam bentuk tabel dengan ukuran-ukuran tendensi sentral guna mempermudah deskripsi data yang menunjang hasil perhitungan indeks.

3.2 Definisi Operasional Dari Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini agar pembahasan terfokus, tidak meluas kemana-mana maka diberikan batasan masalah penelitian. Pembatasan masalah penelitian ini untuk mempermudah analisa dan menjamin keakuratan hasil. Masalah penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada sejauh atau sebesar apa peran pusat pertumbuhan atau Kota Malang (Kecamatan Blimbing, Kedungkandang dan Sukun) terhadap daerah belakang/*hinterland* yaitu Kabupaten Malang (SSWP II Lingkar Kota Malang). Hasil perhitungan dari Indeks Interaksi akan diperkuat oleh data primer hasil survey mengenai akses kebutuhan pokok masyarakat yang sering tertuang dalam konsep IPM yaitu masalah kesehatan, pendidikan dan daya beli. Untuk kesehatan dan pendidikan akan diteliti sejauh mana masyarakat *hinterland* memanfaatkan fasilitas dari pusat. Sedangkan untuk daya beli, akan digambarkan melalui daya serap industri di pusat pertumbuhan terhadap tenaga kerja dari daerah belakang. Dengan terserapnya tenaga kerja daerah belakang maka dapat

diindikasikan penduduk mendapat *income* yang menunjang daya beli masing-masing.

Berikut adalah definisi operasional dari variabel penelitian ini :

a) Interaksi

Interaksi yang dimaksud disini adalah suatu kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil kontak tersebut timbul suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu, baik itu berupa proses sosial maupun ekonomi dimana kondisi dua daerah tersebut adalah saling melengkapi, ada kesempatan untuk melakukan kontak dan adanya kemudahan melakukan transfer atau perpindahan. Disini pelaku interaksi adalah penduduk wilayah nodal dan daerah belakang. Jadi dalam penelitian ini, interaksi yang dimaksud adalah kontak atau hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi dua wilayah bersangkutan yang direpresentasikan oleh Kecamatan Blimbing dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Sukun dengan Kecamatan Wagir dan sekitarnya.

b) Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa suatu kawasan, wilayah atau area yang mampu memberikan perkembangan dan pertumbuhan terhadap daerah belakang yang dipengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada *master plan* BAPPENAS mengenai Kawasan Andalan Malang sehingga yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan adalah Kota Malang. Dari enam BWK yang ada di Kota Malang, dipilih BWK Barat, Timur dan Timur Laut dengan alasan wilayah tersebut merupakan kawasan industri yang nantinya diharapkan mampu menggambarkan interaksi dan daya tarik pusat bagi daerah belakangnya.

c) Daerah Belakang (*hinterland*)

Daerah belakang (*hinterland*) adalah daerah yang berada di sekitar pusat pertumbuhan dimana dalam perkembangannya dipengaruhi oleh pusat pertumbuhan. Dan sesuai dengan acuan *master plan* BAPPENAS juga, maka daerah belakang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Malang yang direpresentasikan oleh kecamatan pada SSWP II Lingkaran Kota Malang yaitu Kecamatan Pakis yang berdekatan dengan Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Wagir yang berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan sekitarnya. Pemilihan Kecamatan Pakis karena daerah ini adalah kawasan industri sedang Wagir merupakan *hinterland* terdekat dari pusat pertumbuhan.

3.3 Teknik Analisa Data

Dalam pengukuran besarnya peranan pusat pertumbuhan peneliti mengaplikasikan Teori Interaksi yang menghasilkan perhitungan secara kuantitatif berupa angka Indeks Interaksi. Jadi setelah data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian terkumpul, maka dilakukan perhitungan besarnya interaksi yang merupakan cerminan dari peranan pusat pertumbuhan terhadap daerah belakang. Besar kecilnya angka indeks belum mampu menjelaskan secara menyeluruh karena adanya asumsi-asumsi seperti kemudahan mobilitas penduduk dari daerah belakang menuju pusat pertumbuhan tidak terhalang atau menghilangkan hambatan geografis dan sebagainya. Maka dari itu dipergunakan data primer berupa data arus penduduk. Data ini nantinya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu yang menjelaskan mengenai kesehatan, pendidikan dan industri. Masing-masing data tidak berdiri sendiri namun saling terkait satu sama

lain. Karena *grand theory* dari ketiganya merupakan konsep perhitungan IPM yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode statistik deskriptif dengan penggunaan tendensi sentral. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara lebih detail mengenai ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya sehingga akan lebih mudah dipahami hasil perhitungan indeks interaksinya dengan alasan-alasan pendukung. Disini tujuan mengemukakan data hasil survey bukan untuk menarik kesimpulan secara general karena untuk menarik kesimpulan kita kembali lagi pada rumusan masalah yang telah dijawab dengan menggunakan alat analisa kuantitatif berupa Indeks Interaksi.

3.3.1 Analisa Indeks Interaksi

Istilah model gravitasi tidak digunakan hingga tahun 1920-an tetapi sebenarnya ahli geografi di abad ke-19 telah menggunakan hukum Sir Isaac Newton tentang Gravitasi (1687) yang mengatakan bahwa dua benda akan saling tarik menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak pangkat dua. Konsep gravitasi dalam studi tentang perdagangan telah diperkenalkan oleh W.J. Reilly di tahun 1929. (Bintarto, 1979: 80)

Dalam analisa gravitasi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik (interaksi)

antar daerah (Warpani Soewarjoko, dalam Asri 1998). Indeks gravitasi ini dihitung sebagai berikut (R. Bintarto dan Hadisumarmo S., 1982 : 80) :

$$I_{12} = a \frac{P_1 P_2}{J_{12}^b}$$

Dimana :

I_{12} = interaksi antara wilayah 1 dan 2

P_1 = jumlah penduduk wilayah 1

P_2 = jumlah penduduk wilayah 2

J_{12} = jarak antara wilayah 1 dan 2

a = suatu konstanta empiric dimana dalam hal ini dianggap nilainya adalah satu

b = suatu eksponen jarak yang nilainya adalah dua

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan wilayah 1 adalah wilayah pusat pertumbuhan (Kota Malang) sedangkan wilayah 2 adalah wilayah *hinterland* (SSWP II Kabupaten Malang). Sehingga P_1 menggambarkan jumlah penduduk Kota Malang dan P_2 menggambarkan jumlah penduduk masing-masing kecamatan pada SSWP II.

Dengan menggunakan model gravitasi, maka akan dapat diukur interaksi diantara dua region (daerah). Dalam hal ini Edward Ullman telah mensistematisasikan pengertian interaksi keruangan yang didasarkan pada tiga faktor, yaitu region yang saling melengkapi (*region complementarity*), kesempatan berinteraksi dan kemudahan transfer.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan suatu kota terbesar kedua di Jawa Timur yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan laut serta pada koordinat $112^{\circ}34' 13''$ - $112^{\circ}41' 39''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54'40''$ - $8^{\circ}3'5''$ Lintang Selatan. Kota Malang berhawa sejuk dan kering dengan curah hujan rata-rata tiap tahun 1.883 mm dan kelembaban udara rata-rata 72%. Sedangkan suhu rata-rata $24,13^{\circ}\text{C}$ dengan suhu terendah 14°C yang terjadi pada sekitar bulan Juli-Agustus dan suhu tertinggi $32,2^{\circ}\text{C}$ terjadi pada sekitar bulan November. Sedangkan kemiringan tanah wilayah di Kota Malang adalah 3° - 5° di sebelah utara, tengah dan selatan serta 5° - 15° untuk sebelah timur dan barat.

Dengan kedudukan geografis Kota Malang yang strategis menjadikan Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar. Udara yang sejuk memungkinkan dijadikan sebagai tempat peristirahatan, dan kota wisata atau sebagai kota pengembangan pendidikan dan latihan. Keadaan tanah yang subur dan letaknya yang berada di tengah wilayah Jawa Timur, menjadikan Kota Malang sebagai distributor barang dan jasa, dan dikembangkannya industri kecil, sedang maupun industri besar. Menurut tingkat pendidikan pencari kerja, mayoritas adalah lulusan SMU dan S-1 dengan kelompok umur

20-29 sebanyak 7.435 orang, umur 30-35 sebanyak 14.396 orang dan umur 36-44 sebanyak 5.000 orang. Besarnya pencari kerja ini diikuti pula oleh perkembangan industri baik sedang maupun besar. Untuk industri sedang, sampai pada tahun 2007 tercatat 156 industri yang tersebar di Kota Malang dan dominasi berada di kecamatan Blimbing dan Sukun. Sedangkan industri besar tercatat sebanyak 41 industri dan mayoritas berada di kecamatan Sukun. Namun menurut RTRW Kota Malang, daerah industri akan difokuskan pada Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, hanya Kecamatan Klojen yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi karena merupakan pusat pemerintahan namun laju pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang datang mencapai 20.997 orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 22.789 pada tahun 2007. Sedangkan jumlah penduduk yang pindah juga mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2007 dengan jumlah masing-masing 18.693 dan 21.452. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007 yang dilakukan BPS Kota Malang, penduduk dengan tingkat pengeluaran di atas Rp. 500.000 paling mendominasi yaitu 37.50% dari total penduduk. 36.96% berada pada kelompok berpengeluaran antara Rp. 300.000-499.999 sedang sisanya melakukan konsumsi dibawah nominal Rp. 299.999. Ini menandakan bahwa menurut konsumsi atau pengeluaran penduduk maka penduduk kota Malang tergolong penduduk golongan menengah keatas.

Kemampuan daya beli masyarakat akan mencerminkan kekuatan ekonomi suatu wilayah. Kemampuan daya beli ini merupakan modal terbaik bagi wilayah untuk mengetahui kekuatan ekonomi masyarakatnya. Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan mempunyai tingkat kesejahteraan sosial, serta daya beli dan kekuatan ekonomi yang berbeda. Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Hampir 65% memiliki bangunan kelas menengah keatas dan hampir 87% dari jumlah penduduk memiliki sepeda motor. Daya beli masyarakat di kecamatan ini cukup baik yaitu sekitar 79% masyarakat mampu berbelanja di supermarket. Wilayah ini mempunyai potensi kekuatan ekonomi terutama home industri serta industri kecil yang berorientasi pasar sehingga sumbangan terhadap perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh besar. Penghitungan paritas daya beli masyarakat di Kota Malang dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 : Penghitungan Paritas Daya Beli per Kecamatan

Kecamatan	Rata-rata RT	Nilai Konsumsi Per kapita		Konsumsi (IHK)	Indeks PPP
		Sebulan	Setahun		
Kedungkandang	4,37	333.050,66	3.966.607,95	396,02	57,28
Sukun	3,85	233.754,87	2.805.058,41	277,95	40,20
Klojen	3,38	378.040,97	4.536.491,63	344,25	49,79
Blimbing	4,36	277.681,02	3.332.172,27	300,82	43,51
Lowokwaru	3,13	354.400,19	4.252.802,24	416,61	60,26
Kota Malang	3,76	310.735,90	3.728.830,78	341,19	49,35

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang tahun 2008

Sementara angka harapan hidup di Kota Malang sebesar 66,64 menunjukkan angka yang cukup tinggi seperti tertera pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 : Angka Harapan Hidup Kota Malang dirinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Angka Harapan Hidup
1	Kedungkandang	65,51
2	Sukun	67,77
3	Klojen	67,98
4	Blimbing	68,32
5	Lowokwaru	61,28
Angka Harapan Hidup Kota Malang		66,64

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang tahun 2008

Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan dengan tingkat Angka Harapan Hidup yang paling tinggi bahkan berada di atas nilai Angka Harapan Hidup Kota Malang, yaitu sebesar 68,32. Sedangkan Kecamatan Lowokwaru merupakan kecamatan dengan nilai Angka Harapan Hidup terendah, yaitu sebesar 61,28. Tiga kecamatan lainnya berada pada nilai rata-rata. Tingginya Angka Harapan Hidup di Kecamatan Blimbing di dukung oleh adanya aglomerasi industri pada daerah tersebut. Dengan berkembangnya industri maka memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sedangkan pelayanan kesehatan juga akan mengikuti arus aglomerasi tersebut. Pendapatan yang lebih serta semakin berkembangnya layanan-layanan kesehatan, membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan terutama pada ibu dan anak. Dimana industri-industri rokok yang banyak berlokasi di kecamatan Blimbing ini juga lebih mengutamakan kesehatan para ibu yang sekaligus adalah motor penggerak utama kegiatan produksi mereka. Sehingga Angka Harapan Hidup di kecamatan ini berada pada posisi tertinggi.

Data yang diperoleh dari Data Base Kota Malang Tahun 2008 mengenai jumlah tamatan menunjukkan gambaran seperti tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 : Jumlah Tamatan Sekolah di Kota Malang

Kategori Masyarakat Berdasarkan Sekolah yang Diselesaikan	2005	2006
Tamatan SD	10739	10233
Tamatan SLTP	10381	10271
Tamatan SLTA	6691	9137

Sumber : Data Base Kota Malang tahun 2008, www.kotamalang.go.id

Berdasarkan data angka melek huruf penduduk di Kota Malang tahun 2008, berada pada angka 95% ; yang menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah Kota Malang untuk mewujudkan pembebasan buta aksara. Hal ini juga di dukung oleh data pada tabel 4.3 di atas dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada tamatan SLTA dari angka 6691 pada tahun 2005 menjadi 9137 pada tahun 2006. Selain program-program yang ditawarkan oleh pemerintah seperti BOS dan sebagainya, minat bersekolah masyarakat juga mengalami animo positif. Tak segan-segan, pemerintah membuka sekolah-sekolah kejuruan baru yang lebih mendekati masyarakat, misalnya SMKN 10 yang terletak di Kecamatan Kedungkandang, SMKN ini berada lebih jauh dari pusat Kota Malang namun lebih mendekati masyarakat pinggiran dengan pertimbangan bahwa masyarakat pinggiran kota juga memiliki animo bersekolah yang tinggi. Selain SMKN 10, ada juga SMKN 9 dan SMKN 6. Dibukanya SMKN-SMKN baru dan bukannya SMAN adalah pilihan yang tepat. Karena masyarakat saat ini lebih membutuhkan *skill* untuk bersaing dalam dunia kerja pun juga ilmu yang berbasis terapan untuk wiraswasta. Secara tidak langsung, pemerintah Kota Malang telah

mengajarkan dan membekali generasi penerusnya untuk hidup mandiri dan kreatif.

4.1.2 Gambaran Umum SSWP II Kabupaten Malang

SSWP II adalah Sub Satuan Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang. Secara geografis, SSWP ini mengelilingi Kota Malang. Untuk PDRB ADHK, SSWP ini merupakan yang tertinggi dari delapan SSWP yang ada di Kabupaten Malang. Peningkatan secara bertahap tampak sejak tahun 2005-2007. Pada tahun 2005, PDRB ADHK sebesar 9.923.823,15 juta rupiah dan untuk tahun 2006 dan 2007 masing-masing adalah 11.617.936,65 juta rupiah dan 12.325.207,42 juta rupiah dengan dominasi sektor tersier sebesar kurang lebih 40% dari total PDRB. Porsi sektor primer sebesar 25% dan sektor sekunder 35%. Sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Malang tidak kurang dari 28,25% dari total delapan SSWP yang ada (sumber : PDRB Kab.Malang 2007). Tingkat pertumbuhan SSWP II ini juga menduduki peringkat tiga besar dalam pertumbuhan ekonominya, yaitu peringkat dua di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, sebesar 6,52%.

Tabel 4.4 : IPM SSWP II Lingkar Kota Malang

No.	Kecamatan	AHH	Pendidikan	PPP	Peringkat
1	Dau	69.33	74.18	64.02	3
2	Karangploso	74.83	72.79	63.98	2
3	Singosari	75.00	78.37	64.83	1
4	Pakis	68.00	71.80	63.97	5
5	Tajinan	64.27	70.57	57.61	8
6	Bululawang	71.00	74.09	57.26	6
7	Pakisaji	71.67	75.76	58.43	4
8	Wagir	68.33	71.45	58.82	7

Dari delapan kecamatan yang termasuk dalam SSWP II, Kec. Singosari merupakan kecamatan dengan IPM tertinggi dan juga berada pada nomor urut 3 dari total 33 kecamatan di Kab. Malang. Sedangkan IPM terendah dalam SSWP II diduduki oleh Kecamatan Tajinan. Kecamatan tersebut berada pada nomor urut 27 dari total 33 kecamatan di seluruh Kabupaten Malang. Komponen IPM ada tiga, salah satunya adalah pendidikan. Data menunjukkan bahwa pendidikan di Kecamatan Singosari lebih unggul dalam artian banyak masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK kemudian disusul oleh Kecamatan Pakis dan Wagir. Nampak bahwa Kecamatan Singosari lebih unggul dalam kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan Tajinan merupakan kecamatan dengan IPM terendah nampaknya bisa dinalar dengan melihat jumlah penduduk yang melanjutkan hingga jenjang SMA/SMK sangatlah rendah, terendah juga dalam SSWP II. Namun bukan pendidikan saja yang masih tergolong rendah di Kecamatan Tajinan ini, Angka Harapan Hidupnya juga yang paling rendah dalam SSWP II, yaitu sebesar 64,27. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan dimungkinkan karena jarak tempuh menuju pusat yang sangat jauh yaitu 18Km. Sedangkan fasilitas yang tersedia pada area lokal tidak begitu mencukupi.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang sebesar 0.67 dengan kepadatan rata-rata penduduk 754/km persegi. Dan secara sektoral, tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan mendominasi dari sektor-sektor lainnya yaitu sebanyak 35.039 pekerja dari total 54.872 dari data yang

dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten. Dan dari penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Menurut Badan Hukum Tahun 2007, Kecamatan Pakis merupakan kecamatan yang memiliki lebih dari 100 perusahaan dengan Badan Hukum dan posisi kedua adalah Kecamatan Singosari sebanyak 96 perusahaan. Ini merupakan efek aglomerasi dari penetapan kawasan Utara dan Timur Laut Kota Malang sebagai kawasan industri dimana batas wilayah kedua daerah ini adalah Kecamatan Pakis dan Singosari. Terjadinya *spread effect* dalam bentuk aglomerasi kawasan industri antara Kota Malang dan Kabupaten Malang merupakan hasil positif dari adanya konsep Kawasan Andalan Malang dan interaksi antar dua daerah tersebut. Aktivitas ekonomi SSWP II mendapat imbas eksternalitas pertumbuhan Kota Malang, akibat daya dukung lahan Kota Malang yang tidak mampu menampung perkembangan pertumbuhan aktivitas ekonomi sektor sekunder dan tersier yang pada akhirnya mau tidak mau meluas ke pinggir kota dan melebar ke wilayah Lingkar Kota Malang, contohnya berdirinya industri baru di Pakis, yaitu kecamatan yang berbatasan dengan kawasan industri Kota Malang (Kecamatan Blimbing), perumahan, perluasan jasa pendidikan dan lembaga keuangan non bank.

Tabel 4.5 : Jarak Antara Kecamatan-kecamatan Pada SSWP II Dengan Kota Malang

No.	Kecamatan	Jarak menuju Kota Malang
1.	Singosari	10 Km
2.	Pakis	14 Km

3.	Tajinan	18 Km
4.	Bululawang	11 Km
5.	Pakisaji	11 Km
6.	Wagir	8 Km
7.	Dau	12 Km
8.	Karangploso	14 Km

Sumber : *Malang Regency in Figures 2008* (diolah)

Berdasarkan jarak tempuh menuju pusat pertumbuhan yaitu Kota Malang, Wagir merupakan kecamatan yang terdekat dan Tajinan adalah kecamatan yang mempunyai jarak tempuh terjauh dari pusat pertumbuhan. Dengan kisaran jarak antara 8-18 Km, apabila kondisi prasarana fisik (infrastruktur dasar) berupa jalan kondisinya baik, maka penetrasi dari pusat pertumbuhan diharapkan lebih besar daripada kecamatan-kecamatan lain dalam SSWP lainnya. Namun, IPM Kecamatan Singosari menempati posisi atas dan kecamatan ini menduduki peringkat nomor 2 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Sedangkan kecamatan Wagir yang jaraknya lebih dekat dengan Kota Malang, IPMnya menempati posisi 7 pada SSWP II. Seharusnya dengan jarak yang relatif pendek dan dekat dengan lokasi industri di Kecamatan Sukun, IPM Kecamatan Wagir bisa digenjot untuk terus naik. Begitu juga dengan Kecamatan Pakis. Sentra industri SSWP II berada di kecamatan ini. Jarak dengan Kota Malang juga tidak begitu jauh namun IPMnya berada pada posisi 5, dengan sumbangan dari *Purchasing Power Parity* yang paling lemah dan sumbangan dari Pendidikan yang dominan pada perhitungan IPMnya.

4.2 Analisis dan Interpretasi Data

4.2.1 Hasil Perhitungan dan Analisis Indeks Interaksi

Dalam analisa gravitasi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik (interaksi) antar daerah (Warpani Soewarjoko, dalam Asri 1998). Dengan menggunakan model gravitasi, maka akan dapat diukur interaksi diantara dua region (daerah). Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Interaksi antara Kota Malang dengan SSWP II Kabupaten Malang :

Tabel 4.6 : Hasil Analisis Indeks Interaksi

NO	Kecamatan Pada SSWP II	Interaksi	Peringkat
1	Dau	283.169.093,0	6
2	Karangploso	234.660.557,8	7
3	Singosari	1.056.701.453,0	1
4	Pakis	403.069.742,1	4
5	Tajinan	110.652.544,8	8
6	Bululawang	393.067.595,5	5
7	Pakisaji	441.433.114,9	3
8	Wagir	790.028.995,4	2

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Konsep gravitasi sederhana dilandaskan pada asumsi bahwa interaksi antara dua wilayah mempunyai hubungan proporsional langsung dengan massa pusat-pusat yang bersangkutan dan mempunyai hubungan proporsional terbalik dengan jarak antara pusat-pusat tersebut. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur massa dan jarak tergantung pada persoalan yang hendak dipecahkan dan pada ketersediaan data. Dalam analisa Indeks Interaksi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dipersamakan dengan hubungan antar massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik-menarik (interaksi) antar daerah (dalam Asri,1999).

Dengan semakin besarnya fungsi suatu kota, maka sarana prasarana yang ada akan lebih besar pula. Hal ini tentunya akan mengakibatkan aglomerasi atau adanya pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di tempat-tempat tertentu yaitu tempat yang sarananya lengkap. Tempat tersebut memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan daerah lainnya. Kekuatan interaksi antara wilayah Kota Malang yang berbatasan langsung dengan wilayah Lingkar Kota Malang (SSWP II) Kabupaten Malang dapat dilihat pada hasil perhitungan Indeks Interaksi dalam Tabel 4.6.

Hasil analisa Indeks Interaksi memperlihatkan bahwa Kota Malang memiliki daya tarik yang kuat terhadap daerah belakangnya, dimana interaksi terkuat terjadi pada wilayah Kecamatan Singosari yaitu sebesar

1.056.701.453,0. Sedangkan untuk kecamatan yang terlemah interaksinya adalah Kecamatan Tajinan dimana interaksi kecamatan ini hanya sepersepuluh dari Kecamatan Singosari. Perhitungan Indeks Interaksi ini sangat dipengaruhi oleh dua variabel yaitu jarak antara dua wilayah bersangkutan dan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Meskipun pada Tabel 4.5 jarak antara dua wilayah yang berbeda administrasi (Kota Malang dengan Kabupaten Malang) misalnya saja Kecamatan Wagir adalah 8Km dan Kecamatan Singosari adalah 10Km menuju pusat pertumbuhan (Kota Malang) namun dalam hasil perhitungan Indeks Interaksinya, Kecamatan Singosari lebih tinggi daripada Kecamatan Wagir. Disini besarnya penduduk pada Kecamatan Singosari adalah dua kali lipat jumlah penduduk pada Kecamatan Wagir, sehingga indeks diantara keduanya berbeda dimana Kecamatan Singosari lebih unggul. Kecamatan ini unggul tidak saja dalam hal kuantitas penduduk tapi juga kualitasnya dimana pada Tabel 4.4 IPM kecamatan dipengaruhi secara dominan oleh sisi Pendidikan.

Berbeda halnya dengan Kecamatan Pakis. Dari delapan kecamatan yang berada dalam SSWP II Lingkaran Kota Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat, 1.946 jiwa/Km^2 . Secara kuantitas jumlah penduduk pada Kecamatan Pakis berada satu tingkat dibawah Kecamatan Singosari yang merupakan kecamatan nomor satu dalam hal kuantitas penduduknya pada SSWP II. Namun untuk jarak, Kecamatan Pakis berada pada kilometer 14 dari pusat pertumbuhan sehingga hasil perhitungan Indeks Interaksi menempatkan Kecamatan Pakis pada posisi ke-4. Dengan

interaksi sebesar 403.069.742,1 mampu membawa kecamatan ini pada peringkat 5 pada perhitungan IPM SSWP II Lingkaran Kota Malang.

Indeks Interaksi Kecamatan Tajinan yang merupakan kecamatan dengan jarak terjauh dari pusat pertumbuhan Kota Malang, yaitu 18Km, berada pada posisi terendah. Selain itu juga berada dibawah rata-rata interaksi semua kecamatan dalam Kabupaten Malang, sebesar 168.087.947,5 dimana Indeks Interaksi kecamatan ini hanya sebesar 110.652.544,8. Kelemahan Kecamatan Tajinan selain pada jarak yang jauh dari pusat, daya beli masyarakat juga sangat kecil namun terjadi pergeseran pada pendidikan. Pendidikan untuk Kecamatan Tajinan lebih baik dari tahun ke tahun bahkan selisihnya sangat kecil dari Kecamatan Pakis dan Wagir yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pertumbuhan. Selain itu juga variabel keduanya yaitu jumlah penduduk perlu diperhatikan lebih lanjut. Kecamatan Tajinan ini mempunyai total penduduk 47361, yang merupakan jumlah penduduk paling sedikit diantara delapan kecamatan lainnya. Mengapa penduduk disini sangat berperan dalam menentukan besarnya Indeks Interaksi adalah karena penduduk merupakan pelaku utama dalam kegiatan perekonomian pun interaksi. Yang *mobile* atau bergerak sekaligus penggerak suatu aktivitas adalah manusia atau penduduk itu sendiri. Sedangkan jarak bisa diibaratkan sebagai hambatan dan jalan adalah moda atau fasilitas penunjang.

Secara keseluruhan untuk SSWP II Lingkaran Kota Malang ini memiliki daya interaksi yang tinggi berdasarkan hasil perhitungan Indeks Interaksi dimana rata-rata terdiri dari sembilan angka di depan koma. Interaksi yang

tinggi ini menggambarkan adanya perilaku kawasan yang saling mempengaruhi dan terpengaruh antara pusat yaitu Kota Malang dengan daerah belakangnya, Kabupaten Malang.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik sample yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan adalah pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel (Dajan, dalam Wuryaningrum, 2007). Pengukuran statistik sampel bermanfaat untuk mempermudah pengamatan. Melalui hasil perhitungan nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi.

Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata dengan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 : Hasil Analisis Data Primer

No.	Responden	Indikator	Tendensi Sentral (% Jawaban Responden)
1	Industri	Biaya	23 %
		Kemudahan Akses	32 %
		Jarak	45 %
2	Pendidikan	Biaya	16 %
		Pelayanan	0 %
		Kemudahan Akses	40 %

		Jarak	44 %
3	Kesehatan	Biaya	20 %
		Pelayanan	25 %
		Kemudahan	20 %
		Akses	
		Jarak	35 %

Sumber : Data Primer (diolah)

Karakteristik responden yang digunakan pada responden industri adalah pegawai borongan untuk industri rokok dan pegawai harian untuk perusahaan tekstil dengan kriteria khusus bahwa mereka adalah pegawai yang berdomisili di daerah Lingkar Kota Malang (SSWP II). Sedangkan untuk responden pendidikan adalah siswa/siswi SMAN dan SMKN yang telah ditentukan. Mereka juga memiliki kriteria khusus yaitu berdomisili di daerah Lingkar Kota Malang dan bukan merupakan murid pindahan. Begitu pula dengan responden kesehatan, mereka adalah penduduk daerah Lingkar Kota Malang yang memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Malang.

Dalam kuesioner dengan model tertutup, ditanyakan alasan responden dalam memilih tempat bekerja (untuk responden industri), memilih sekolah lanjutan baik itu SMAN maupun SMKN (untuk responden pendidikan) dan alasan memilih puskesmas dan rumah sakit untuk berobat ketika sakit (untuk responden kesehatan). Pertama untuk responden industri, disediakan 3 alasan utama yang telah disesuaikan dengan kebutuhan data peneliti. Alasan pertama adalah biaya dimana biaya ini menyangkut semua biaya yang mungkin diperlukan guna mencapai tempat kerja sekaligus selama bekerja.

Contohnya, biaya transportasi, biaya makan dan sebagainya. Sedangkan alasan kedua adalah kemudahan akses, disini yang dimaksud dengan kemudahan akses adalah kemudahan dalam menjangkau tempat tersebut. Misalnya saja, apakah tempat bekerja dilalui oleh angkutan umum ataukah jalannya dalam kondisi baik sehingga bisa dilalui oleh berbagai moda transportasi dan juga letaknya, dipinggir jalan besar ataukah dalam gang sehingga mempengaruhi kemudahan pekerja untuk mengakses tempat tersebut. Alasan terakhir adalah jarak, dimana jarak ini merupakan jarak antara tempat bekerja dengan rumah pekerja. Apakah jarak juga mempengaruhi mereka dalam menentukan tempat bekerja.

Kedua untuk responden pendidikan, disediakan empat alasan dalam memilih sekolah lanjutan baik SMAN maupun SMKN. Disini peneliti ingin mengetahui alasan para siswa-siswi dalam memilih sekolah, apakah karena biaya, pelayanan, kemudahan akses atau karena jarak. Untuk alasan pertama yaitu biaya, yang dimaksud disini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Contohnya, biaya transportasi menuju sekolah, iuran pendidikan per bulan dan sebagainya. Alasan kedua adalah pelayanan, yang dimaksud dengan pelayanan disini adalah segala fasilitas dan juga jasa yang bisa diperoleh siswa-siswi. Contohnya adalah kemudahan administrasi mengingat mereka berasal dari kabupaten, adanya beasiswa baik prestasi maupun kurang mampu dan sebagainya. Ketiga dan keempat adalah alasan kemudahan akses dan jarak yang intinya sama dengan penjelasan pada responden industri diatas.

Terakhir untuk responden kesehatan yang sama dengan responden pendidikan, disediakan empat alasan pemilihan tempat layanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Alasan pertama yaitu biaya, biaya disini adalah total biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Baik itu biaya administrasi, biaya berobat, biaya dalam menjangkau tempat layanan kesehatan dan sebagainya. Untuk pelayanan, yang dimaksud disini adalah pelayanan baik dari segi medis maupun administratif, berbelit-belit atautkah mudah. Untuk kemudahan akses dan jarak sama seperti penjelasan sebelumnya yang menyangkut masalah *place* dan ada tidaknya moda transportasi menuju kesana.

Pada responden industri, sebanyak 45% dari total responden mengaku memilih bekerja pada industri bersangkutan karena alasan indikator jarak. Sisanya mempertimbangkan alasan kemudahan akses mencapai tempat bekerja dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapainya, masing-masing sebesar 32% dan 23%. Jarak tempuh menuju tempat bekerja menjadi pertimbangan utama bagi pekerja industri yang mayoritas adalah perempuan karena mereka bekerja dengan sistem borongan. Sedangkan kemudahan akses yang menduduki posisi kedua, dipilih dengan beragam alasan.

Pertama tempat bekerja tidak saja harus minimal dilewati satu angkutan umum atau karena mayoritas jarak dengan tempat bekerja tidak terlalu jauh maka mereka memilih berjalan kaki beramai-ramai. Dengan kemudahan akses yang tidak saja berupa moda transportasi tapi juga jalan yang baik dan punya banyak cabang, sangat mendukung bagi mereka. Apalagi dengan

akses yang mudah maka para pedagang yang biasa mangkal di depan pabrik begitu jam bekerja usai, tidak kesulitan membawa barang dagangan dan pekerja pun dengan senang hati berbelanja disana. Terjadi hubungan yang simbiosis mutualisme antara pegawai dan pedagang yang ditunjang oleh kemudahan akses tersebut. Sedangkan 23% lainnya yang tergolong pada biaya, mempertimbangkan biaya guna mencapai tempat bekerja apabila mereka menggunakan angkutan umum ataupun mengendarai sepeda motor.

Sedang dari responden bidang kesehatan, mayoritas responden mengaku bahwa indikator jarak yang menentukan pilihan mereka akan penggunaan fasilitas kesehatan. Berbeda tipis dengan indikator pelayanan, yaitu 35% responden memilih jarak sedang 25% memilih pelayanan dimana selebihnya memilih antara biaya dan kemudahan akses. Jarak tempuh masih menduduki posisi pertama dalam mempengaruhi responden ketika menentukan pilihan dalam penggunaan fasilitas kesehatan. Selain itu, pelayanan yang diperoleh pasien juga turut menentukan preferensi masyarakat. Untuk biaya dan kemudahan akses, nilainya sama yaitu masing-masing 20% responden yang mempertimbangkan besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan guna mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dari kota dan kemudahan akses.

Untuk bidang pendidikan, indikator jarak juga mendominasi alasan 44% responden dalam memilih tempat belajar. Sisanya sebesar 40% karena alasan kemudahan akses dan 16% karena biaya yang harus dikeluarkan guna mencapai tempat tersebut. Keputusan pemerintah Kota Malang yang

meletakkan fasilitas pendidikan hingga ke daerah perbatasan direspon cukup positif oleh masyarakat Kabupaten yang berdomisili di daerah perbatasan. Dengan pertimbangan jarak yang semakin dekat antara rumah dengan tempat layanan pendidikan (SMAN dan SMKN) membuat mereka berorientasi pada jarak ketika memutuskan pemilihan tempat melanjutkan sekolah atas.

Sedangkan 40% lainnya mempertimbangkan kemudahan akses guna mencapai tempat bersekolah. Sedikit dari mereka yang mempertimbangkan biaya sekolah dan tidak ada satu pun yang mempertimbangkan pelayanan pihak sekolah ketika memilih tempat tersebut. Bisa dikatakan bahwa tidak ada kesulitan baik dari segi administrasi meskipun mereka berasal dari kabupaten, maupun biaya yang mungkin memberatkan bagi mereka. Bahkan biaya transportasi juga tidak menjadi beban yang serius karena kebanyakan dari mereka mengendarai sepeda motor atau berangkat sekalian dengan orangtua mereka yang kebetulan juga bekerja di Kota Malang. Ada atau tidaknya beasiswa bukan menjadi dasar bagi mereka ketika memutuskan memilih sekolah. Rata-rata memang benar-benar mempertimbangkan alasan jarak dan kemudahan transportasi atau kemudahan akses menuju sekolah. Namun pemerintah kota juga tidak sembarangan dalam menentukan kualitas sekolah pinggiran tersebut. Dengan rata-rata ratio guru/siswa sebesar 15 dan ratio kelas/siswa sebesar 32, diharapkan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan optimal.

Hasil survey ini mendukung pernyataan dan konsep interaksi antar dua wilayah yang dipengaruhi langsung oleh jarak. Dan kemudahan akses juga merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat mulai tingkat terbawah sampai tingkat lebih tinggi. Pemilihan indikator jarak mempengaruhi ketiga aspek kebutuhan paling dasar penduduk yang mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka yaitu pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang dianalogikan dengan daya serap industri terhadap tenaga kerja. Dimana beberapa hal yang menyebabkan interaksi antar wilayah itu dinilai kuat antara lain adalah :

1. jumlah penduduk;
2. jarak antar wilayah, jauh dekatnya wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik wilayah;
3. kemudahan transportasi untuk mencapai wilayah tersebut;
4. fasilitas dan utilitas yang ada pada wilayah tersebut dalam arti sarana dan prasarana yang memadai.

4.3 Pembahasan

Penerapan kebijakan dan konsep Kawasan Andalan Malang secara umum berhasil diterapkan. Hal ini ditegaskan dalam hasil analisis yang telah diuraikan dalam sub bab analisis. Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa pusat pertumbuhan dalam hal ini adalah Kota Malang, mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerah belakangnya, Kabupaten Malang. Pemilihan analisis dalam penelitian ini mendasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut (John Glasson dalam

Asri, 1999), bahwa dewasa ini banyak permasalahan dalam peranan pusat pertumbuhan yang dalam telaah ilmu ekonomi regional mampu digambarkan dengan baik oleh alat analisis ini. Maka peneliti diarahkan pada perilaku kawasan, artinya seberapa besar perilaku kawasan dapat mempengaruhi kawasan lainnya. Oleh sebab itu, analisis yang digunakan yaitu analisis yang mampu menggambarkan perilaku tersebut melalui proses interaksi antar kawasan itu sendiri. Interaksi yang dimaksud ada beberapa pengertian, yaitu interaksi penduduk antar kawasan, interaksi berupa aliran sumber daya, baik modal, manusia, keruangan dan lain-lain.

Berangkat dari pengertian tersebut maka penulis menggunakan analisis gravitasi yang diadaptasi dari Hukum Newton, yaitu gaya tarik menarik berbanding lurus dengan massa-massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Menurut Nursid Sumadmadja dalam Asri, 1999, dengan menggunakan model gravitasi kita akan dapat mengukur interaksi di antara dua region atau dua tempat.

Tabel 4.8 : Cross Tabulasi Antara IPM dengan Indeks Interaksi

No.	Kecamatan	IPM	Rank	Indeks Interaksi	Rank
1	Dau	69,18	3	283.169.093,0	6
2	Karangploso	70,53	2	234.660.557,8	7
3	Singosari	72,73	1	1.056.701.453,0	1
4	Pakis	67,92	5	403.069.742,1	4
5	Tajinan	64,15	8	110.652.544,8	8
6	Bululawang	67,45	6	393.067.595,5	5
7	Pakisaji	68,62	4	441.433.114,9	3
8	Wagir	66,37	7	790.028.995,4	2

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Dari Tabel Cross Tabulasi di atas, terlihat ada yang tidak sesuai dengan konsep dan teori mengenai interaksi dan dampaknya. Ketika interaksi antar dua wilayah tinggi maka belum tentu IPMnya juga tinggi. Misalnya yang terjadi pada Kecamatan Wagir. Dari hasil perhitungan Indeks Interaksi, kecamatan ini menempati posisi kedua karena jaraknya yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan sehingga *zone of influence* pusat masih terdeteksi. Dan seharusnya IPM Kecamatan Wagir juga tinggi mengingat interaksi masyarakat yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk terkena dampak positif dari pusat pertumbuhan. Selain jarak yang relatif dekat, kondisi jalan juga baik namun IPM Kecamatan Wagir berada pada posisi ke-7 dan komponen PPP merupakan komponen dengan sumbangan terendah padahal seharusnya PPP kecamatan ini mampu digenjut lebih tinggi lagi karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh J.W Fedderke, P. Perkins dan J.M Luiz di Afrika Selatan mengenai *Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*, adalah positif. Artinya apabila infrastruktur dalam kondisi yang mendukung (baik) maka hal itu dapat menambah output produksi yang dalam jangka panjang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan. Dengan output tinggi, maka secara otomatis *income* masyarakat juga meningkat dan PPP atau daya beli masyarakat juga akan meningkat.

Meskipun semua jawaban responden mengarah pada pertimbangan jarak ketika melakukan aktivitas dan pemilihan tempat memperoleh layanan publik, namun ternyata hal itu belum mampu meningkatkan IPM

atau secara general adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk daerah Kecamatan Wagir, hal ini dikarenakan daerah tersebut tidak memiliki faktor *endowment* yang bisa digali dan dioptimalkan penggunaannya. Dari survey lapang yang dilakukan oleh peneliti, kecamatan ini merupakan daerah kering dan berbukit-bukit. Dengan kepadatan penduduk 886 jiwa/ Km² hanya menempati 1.045 Ha lahan untuk pemukiman. Dan 1.316 Ha merupakan lahan basah atau persawahan. Areal paling luas yaitu 3.077 Ha merupakan daerah tegal atau lahan kering. Hal ini yang menghambat tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun rata-rata daya serap kota terhadap tenaga kerja kabupaten sebesar 71% namun hal tersebut belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat kabupaten khususnya Kecamatan Wagir yang karena memang rendah atau miskin sumber daya alam.

Mayoritas penduduk Kecamatan Wagir bekerja dibidang pertanian kemudian dibawahnya lagi bekerja pada bidang perdagangan dan jasa dan tertinggi ketiga bekerja pada bidang industri pengolahan. Sisanya menempati sektor-sektor lainnya. Untuk pekerja bidang pertanian sebanyak 19.017 jiwa, bidang perdagangan dan jasa sebanyak 13.994 jiwa dan sebanyak 7.061 yang bekerja dibidang industri pengolahan dengan total pekerja 45.169 jiwa. Lahan basah yang hanya 1.316 Ha dikerjakan oleh sekitar 19.017 jiwa. Bisa dibayangkan berapa *income* mereka setiap bulannya. Hal inilah satu faktor yang merupakan temuan lapangan dan juga *cross cek* peneliti, yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wagir belum begitu baik.

Untuk Kecamatan Pakis yang merupakan sentra industri pada SSWP II, ada alasan lain mengapa kesejahteraan masyarakatnya juga rendah dalam artian menempati posisi ke-5 dengan komponen PPP juga rendah diantara tiga komponen pembentuk IPM. Dengan penduduk terpadat dibandingkan dengan delapan kecamatan lainnya, sumber daya manusia di kecamatan ini juga baik. Hal ini dapat diindikasikan dengan komponen pendidikan dalam IPM yang mencapai 71.80 dan banyaknya siswa-siswi dari kecamatan ini yang melanjutkan sekolah hingga jenjang SLTA di sekolah-sekolah milik pemerintah Kota Malang. Tidak kurang dari 65% siswa-siswi sekolah pinggiran yang berasal dari daerah kabupaten. Dan untuk Kecamatan Kedungkandang yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakis, sekitar 75% siswa-siswi nya berasal dari Kecamatan Pakis.

Tidak kurang dari 100 industri berlokasi di Kecamatan Pakis. Ini merupakan efek aglomerasi industri dari Kecamatan Blimbing. Namun daya beli masyarakat masih juga rendah. Proporsi penggunaan lahan untuk pemukiman, persawahan dan lahan kering hampir sama yaitu sekitar 1.500 Ha. Namun memang seperti yang juga terjadi di Kecamatan Wagir, mayoritas penduduk bekerja pada bidang pertanian yaitu sebesar 30.850 jiwa. Sedangkan untuk sektor jasa dan perdagangan sebanyak 21.098 jiwa dan untuk industri pengolahan 11.479 jiwa dari total sekitar 73.116 pekerja. Banyaknya industri yang berkembang di kecamatan ini tidak didukung oleh pekerja. Industri yang berkembang di daerah ini tidak menampung luapan tenaga kerja karena sifatnya yang padat modal dan merupakan industri kecil.

Sehingga pekerja banyak yang lari menuju kota dan lebih tertarik untuk berprofesi sebagai petani meski lahan semakin sempit dan juga penduduk semakin bertambah. Alternatif lain mereka bekerja pada bidang jasa dan perdagangan mengingat pada daerah ini banyak bermunculan lembaga keuangan dan tempat pariwisata.

Industri pada daerah *hinterland* kebanyakan bersifat padat modal untuk mengurangi biaya produksi dan juga efisiensi karena biaya transportasinya lebih tinggi dibandingkan dengan industri dalam kota atau pusat. Malah bisa jadi, biaya transportasi akan menghambat pertumbuhan output seperti yang telah diteliti oleh John Luke Gallup dkk dalam penelitiannya yang berjudul *Geography and Economic Growth* (1998). Disini disebutkan bahwa pertumbuhan output dipengaruhi oleh dua variabel yaitu biaya transportasi dan faktor produksi total.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Interaksi, mampu menggambarkan atau membuktikan kebenaran relatif teori pusat pertumbuhan yang menyatakan bahwa teori tersebut menyarankan keperluan untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor kunci di beberapa tempat. Dalam memusatkan usaha pada sejumlah sektor dan tempat yang kecil diharapkan pembangunan akan menjalar pada sektor-sektor lain pada seluruh wilayah, dengan demikian sumber-sumber material dan manusiawi yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan efisien.

Dari perhitungan Indeks Interaksi, mampu diturunkan juga untuk mencari potensi penduduk. Berikut adalah potensi penduduk kecamatan-kecamatan yang tergabung dalam SSWP II Lingkar Kota Malang.

Tabel 4.9 : Potensi Penduduk SSWP II Lingkar Kota Malang

Pp	Nilai Pp	Persentase	Ranking
1(Dau)	8587.54	100	1
2(Karangploso)	5935.914364	69.12240716	4
3(Singosari)	3876.751262	45.14390922	5
4(Pakis)	2536.5592	29.53766969	8
5(Tajinan)	2758.284126	32.11960731	7
6(Bululawang)	3376.211783	39.31523793	6
7(Pakisaji)	7957.043017	92.65800237	2
8(Wagir)	7889.633448	91.87303288	3

Sumber : Data Sekunder (diolah)

Dari Tabel 4.9 tersebut, Kecamatan Dau memiliki potensi penduduk yang paling tinggi diantara delapan kecamatan yang ada pada daerah Lingkar Kota Malang sedangkan Kecamatan Pakis merupakan daerah dengan potensi penduduk terendah. Namun apabila dilihat secara nyata dilapangan, Kecamatan Pakis merupakan daerah industri baru yang terkena dampak aglomerasi industri dari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dan dilihat dari IPM, kecamatan ini menduduki peringkat 5 dari delapan kecamatan dalam SSWP II. Sedangkan dari tingkat interaksinya, kecamatan ini menduduki posisi ke-4. Potensi penduduk ini menggambarkan kemudahan mobilitas

penduduk karena variabel yang digunakan masih jumlah penduduk dan juga jarak. Namun disini, jarak yang digunakan adalah jarak yang menghubungkan satu kecamatan dengan tujuh kecamatan lainnya. Dan jika dilihat dari potensi, maka lokasi dan penduduk di Kecamatan Dau adalah yang paling potensial. Kegiatan ekonomi bisa diarahkan ke kecamatan ini begitu juga pengembangan-pengembangan lainnya. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Dau dilewati arus menuju Kota Batu dan Kota Kediri sehingga mobilitas lebih memungkinkan untuk dilakukan. Kecamatan ini juga lumayan padat penduduk yaitu 1.284 jiwa/Km^2 . Daya dukung lahan kering juga mendukung, tidak kurang dari 2200 Ha lahan kering yang tersedia pada Kecamatan Dau. Untuk pemukiman, lahan basah dan agrikultur masing-masing tidak kurang dari 400 Ha. Industri-industri baru memungkinkan untuk didirikan pada daerah ini.

Menurut Hermansen (dalam Asri, 1999), dalam penerapan kebijaksanaan pusat pertumbuhan ada beberapa tipologi, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penggunaan teori ini dalam praktek. Tipologi tersebut antara lain adalah kebijaksanaan pembangunan, kebijaksanaan pemulihan serta kebijaksanaan pembangunan dan pemulihan. Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tipologi kebijaksanaan pembangunan adalah suatu daerah yang tidak memiliki ciri-ciri industri yang riil. Tipologi kebijaksanaan pemulihan adalah suatu kutub pemulihan untuk mengurangi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh suatu kawasan industri yang besar dengan jalan menjadikan

daerah persoalan itu sendiri sebagai suatu kekuatan tarik yang bersifat mengimbangi.

Berdasarkan pengertian tipologi tersebut dan melihat hasil analisis Indeks Interaksi, maka Kawasan Andalan yang dibentuk oleh BAPPENAS dapat dikategorikan sebagai tipologi kebijaksanaan pemulihan mengingat adanya kawasan industri baik pada Kota Malang yaitu di Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Blimbing dan juga pada Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa interaksi dengan pusat pertumbuhan membawa dampak positif bagi daerah belakang. Positif karena adanya aglomerasi industri di Kecamatan Blimbing mampu menumbuhkan industri di daerah belakang atau Kecamatan Pakis. Partisipasi masyarakat dalam tiga bidang yang menjadi indikator pengukuran kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja untuk area Lingkar Kota Malang sebenarnya sangat mendukung dilihat dari faktor jarak. Sehingga mereka masih termasuk pada *zone of influence* dari pusat pertumbuhan. Namun ternyata indikator jarak saja tidak lah cukup untuk menilai dampak dari pusat pertumbuhan. Masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk jumlah penduduk dan keadaan geografis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Interaksi yang terjadi antara pusat pertumbuhan (Kota Malang) dengan daerah belakang (Kabupaten Malang) adalah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari angka Indeks Interaksi yang mencapai sembilan angka di depan koma. Interaksi tertinggi dari Kabupaten Malang terjadi pada Kecamatan Singosari yaitu 1.056.701.453,0 yang mengindikasikan bahwa sarana-sarana yang tersedia di pusat pertumbuhan dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah-daerah belakangnya dan semakin besar pula peranan atau fungsi pusat tersebut sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya;
2. Mayoritas masyarakat dari daerah belakang mempertimbangkan jarak tempuh dan kemudahan akses ketika melakukan pilihan tempat layanan kesehatan, pendidikan dan juga bekerja.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Malang hendaknya memperbaiki akses menuju Kota Malang agar potensi-potensi yang berada pada daerah belakang mampu tersalurkan secara optimal.
2. Peningkatan kualitas SDM dengan pembangunan sekolah-sekolah lanjutan dan juga puskesmas yang lebih mendekati masyarakat juga diperlukan untuk

meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Malang agar mampu bersaing secara optimal dengan masyarakat kota.

3. Dan perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai potensi yang ada pada masing-masing kecamatan yang secara jelas merupakan daerah pendukung pusat pertumbuhan sehingga akan tercipta keunggulan kompetitif yang mampu mempersempit kesenjangan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Arief, Sritua. 1979. *Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Dan Kemiskinan Masal*. Jakarta Pusat: Lembaga Studi Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang. *Rancangan Perda RTRW Kabupaten Dati II Malang*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2008). *Kabupaten Malang Dalam Angka 2008*

----- . (2008). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Tahun 2008*

----- . (2008). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2008*

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2008). *Kota Malang Dalam Angka 2008*

Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Bintarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta : LP8ES

Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi. No.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE

Bank Indonesia. (2008). *Kajian Ekonomi Regional Wilayah Kajian Bank Indonesia Malang. Semester I-2008*

Daldjoeni. 1997. *Geografi Baru: Organisasi Keruangan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Alumni

-----, 1996. *Geografi Kota Dan Desa. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Alumni

-----, 1997. *Pengantar Geografi Untuk Mahasiswa Dan Guru Sekolah*. Bandung: PT. Alumni

Fedderke, J.W, Perkins, P., Louis J.M. (2006). *Infrastructural Investment in Long-run Economic Growth: South Africa 1875–2001*. World Development Journal Vol. 34 No. 6. <http://sciencedirect.com/>

Gallup, John Luke, Jeffrey Sachs and Andrew D. Mellinger. (1998). *Geography and Economic Growth*. Paper prepared for the Annual Bank Conference on Development Economics, Washington DC. April 20-21, 1998.

Hasyim, Wahid, dkk. (2000). *Pola Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota: Tinjauan Terhadap Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Blitar*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol.XII No.1. Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan, Lembaga Penelitian UB.

Keksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomi Perkotaan*. Edisi Empat. Yogyakarta : BPFE

Koestoer, Raldi Hendro. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa Kota: Teori Dan Kasus*. Jakarta: UI Press

-----, (1994). *Land Use Location Theories In Contruction The Desa-Kota Features*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol I No.2. PPT – LIPI Jakarta

Lo, Fu Chen dan Kamal Solih. 1976. *Kutub-Kutub Pertumbuhan Dan Kebijakan Regional Di Dalam Sistem Ekonomi Dualistik Yang Terbuka: Teori Barat Dan Kenyataan Di Asia*. Jakarta: FE UI

Muta'ali, Luthfi. (2003). *Studi Penentuan Desa-desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Majalah Geografi Indonesia, Vol 17 No. 1 Maret 2003. Fakultas Geografi UGM.

Richardson, Harry W. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (Paul Sitohang). Jakarta: LP FE UI

Romdiati, Haning dan Mita Noveria. (2006). *Mobilitas Penduduk Antar Daerah Dalam Rangka Tertib Pengendalian Migrasi Masuk Ke DKI Jakarta*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.1 No.1. PPK-LIPI

Rusli, Said. 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia

Sanusi, Anwar. 2003. *Sumber Dana Pembangunan Daerah: Pengaruhnya Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah*. Malang: Buntara Media

Sudibyo, Rahmad Pulung. (2006). *Partisipasi Masyarakat Sub Urban Dalam Pembangunan Kota Malang*. Jurnal Humaniti Vol.1 No.2. FP UMM

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Supardi. 2005. *Metedologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jogjakarta : UII Press

Sumardi, Mulyanto dan Hans Dieter Evers. 1982. *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok Dan Perilaku Penyimpang*. Jakarta: CV. Rajawali

Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Tjokroamidjojo, Bintarto. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Masagung

Lampiran 1: Kuesioner Perusahaan**I. Umum**

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat :
4. Telp/Fax/Email :
5. Badan Hukum :
6. Surat Ijin :
7. Tahun Berdiri :
8. Produk :
9. Alasan memilih lokasi :
10. Jumlah Pegawai : a. Laki-laki = (%)
b. Perempuan = (%)
11. Jumlah Pegawai dari Kabupaten : a. Laki-laki = (%)
b. Perempuan = (%)

II. Produksi

1. Sifat Proses Produksi : Kontinyu/Intermiten
2. Sifat Teknik Produksi : Padat Karya/Padat Modal
3. Bahan Baku : a. Jenis =
b. Asal = impor/lokal

catatan :

Lampiran 2: Kuesioner Puskesmas**I. Umum**

1. Nama Puskesmas :
2. Nama Pimpinan :
3. Alamat :
4. Telp/Fax/Email :
5. Badan Hukum :
6. Surat Ijin :
7. Tahun Berdiri :
8. Kapasitas :

II. SDM (tenaga medis)

1. Jumlah Dokter :
2. Jumlah Bidan :
3. Jumlah Perawat :

III. Pasien

1. Jumlah Pasien umum/bulan =
2. Asal Pasien
 - a. Kota Malang =
 - b. Kab. Malang =

Lampiran 3: Kuesioner SMAN/SMKN**I. Umum**

1. Nama Sekolah :
2. Nama Kepsek :
3. Alamat :
4. Telp/Fax/Email :
5. Badan Hukum :
6. Surat Ijin :
7. Tahun Berdiri :
8. Kapasitas :

II. SDM (tenaga pendidik)

1. Jumlah Guru : a. Tetap =
b. GTT =
2. Jumlah Ruang : a. Kelas =
b. Lab. =
c. Lainnya =

III. Siswa-siswi

1. Jumlah Siswa :
2. Asal Siswa : a. Kota Malang =
b. Kab. Malang =

Lampiran 4: Kuesioner Responden

Wawancara Pegawai/Pasien/Siswa-siswi

I. Data Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

II. Pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap perusahaan/sekolah/puskesmas

Alasan apa yang paling mendasari Anda dalam memilih tempat ini?

- a. Biaya
- b. Pelayanan
- c. Kemudahan Akses
- d. Jarak

Lampiran 5: Data Responden Industri

Responden Pegawai				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
1	Asih S.	Pakis	Kemudahan Akses	3
2	Sri Sulistyowati	Pakis	Kemudahan Akses	3
3	Endah R.	Pakis	Kemudahan Akses	3
4	Rofiatun	Pakis	Biaya	1
5	Rukijani	Pakis	Kemudahan Akses	3
6	Suhartini	Pakis	Biaya	1
7	Kartika	Pakis	Jarak	4
8	Nanik Purniati	Pakis	Biaya	1
9	Sri Ledjariati	Pakis	Biaya	1
10	Yulia Nurlaily	Pakis	Kemudahan Akses	3
11	Sunarsih	Pakis	Jarak	4
12	Asih Fitria	Pakis	Jarak	4
13	Karima Ulfa	Singosari	Kemudahan Akses	3
14	Suwatini	Singosari	Kemudahan Akses	3
15	Juanah	Pakis	Kemudahan Akses	3
16	Wiji Wulandari	Pakis	Kemudahan Akses	3
17	Anik Istyowati	Singosari	Kemudahan Akses	3
18	Sri Retna	Pakis	Jarak	4
19	Siti Jauhari	Pakis	Jarak	4
20	Ninuk Nurhayati	Pakis	Biaya	1
21	Tri Luhpalupi	Pakis	Jarak	4
22	Ida Hayati	Singosari	Biaya	1
23	Nasir Masri	Singosari	Biaya	1
24	Diah Indarti	Singosari	Biaya	1
25	Surato	Karangploso	Jarak	4
26	M. Rofiul	Karangploso	Jarak	4
27	Teguh Santoso	Karangploso	Jarak	4
28	Asna Rulianti	Karangploso	Jarak	4
29	Muksin	Singosari	Kemudahan Akses	3
30	Siswanto	Singosari	Kemudahan Akses	3
31	Djoko Santoso	Singosari	Jarak	4
32	Aris Hidayat	Singosari	Jarak	4
33	Farida Hayati	Pakis	Jarak	4
34	Tatik N.	Pakis	Jarak	4

Lanjutan Lampiran 1

Responden Pegawai				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
35	Sofia Alifah	Pakis	Jarak	4
36	Wulan K.	Pakis	Jarak	4
37	Rindu Warah	Pakis	Jarak	4
38	Sunariyah	Pakis	Jarak	4
39	Manik Sri S.	Pakis	Jarak	4
40	Endang S.	Pakis	Jarak	4
41	Erna Hadiati	Pakis	Jarak	4
42	Ani Musrifah	Pakis	Jarak	4
43	Sumakyah	Singosari	Jarak	4
44	Riati	Singosari	Jarak	4
45	Yayuk I.	Karangploso	Kemudahan Akses	3
46	Ririn Dwi	Karangploso	Kemudahan Akses	3
47	Suparmi	Pakis	Biaya	1
48	Nikayah	Karangploso	Kemudahan Akses	3
49	Sri Wahyuni	Singosari	Kemudahan Akses	3
50	Iis Komalasari	Singosari	Biaya	1
51	Mistikah	Singosari	Biaya	1
52	Susiati	Pakis	Biaya	1
53	Rusi Lulandari	Pakis	Kemudahan Akses	3
54	Nunuk	Pakis	Kemudahan Akses	3
55	Sari K.	Wagir	Biaya	1
56	Linawati	Wagir	Kemudahan Akses	3
57	Trisna	Wagir	Jarak	4
58	Indah S.	Wagir	Biaya	1
59	Novita	Wagir	Kemudahan Akses	3
60	Evi Dwi	Wagir	Jarak	4
61	Iis Ika P.	Wagir	Biaya	1
62	Wiwin	Wagir	Biaya	1
63	Sri Maryati	Dau	Jarak	4
64	Rakhmawati	Dau	Jarak	4
65	Susan Priati	Dau	Biaya	1
66	Mudjiwati	Dau	Kemudahan Akses	3
67	Ana R.	Dau	Kemudahan	3

			Akses	
68	Anita Putri	Dau	Kemudahan Akses	3

Lanjutan Lampiran 1

Responden Pegawai				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
69	Rokanah	Dau	Jarak	4
70	Lia Sefiana	Dau	Jarak	4
71	Nur Syamsiah	Wagir	Jarak	4
72	Ajeng K.	Wagir	Jarak	4
73	Samiyah	Wagir	Jarak	4
74	Nene Marini	Wagir	Jarak	4
75	Bambang S.	Wagir	Kemudahan Akses	3

Persentase Jawaban Responden

Kemudahan Akses	0.32
Jarak	0.453333
Biaya	0.226667

Lampiran 6: Data Responden Kesehatan

Responden Puskesmas				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
1	Yusron Fuadi	Wagir	Jarak	4
2	Zulaika	Wagir	Kemudahan Akses	3
3	Catur	Wagir	Jarak	4
4	Dewi	Wagir	Jarak	4
5	Sulastri	Wagir	Jarak	4
6	Rofi Sudjati	Wagir	Pelayanan	2
7	Eko Tristanto	Wagir	Kemudahan Akses	3
8	Ambarwati	Tajinan	Biaya	1
9	Puji Lestari	Tajinan	Pelayanan	2
10	Kholidah p.	Tajinan	Pelayanan	2
11	Fuad Kurnia	Tajinan	Pelayanan	2
12	Riezky Sugiono	Tajinan	Pelayanan	2
13	Heru Listian	Tajinan	Jarak	4
14	Dwi Nurhayati	Tajinan	Jarak	4
15	Sri Murdaning	Tajinan	Jarak	4
16	Lutfiah A.	Bululawang	Biaya	1
17	Marsudi	Bululawang	Biaya	1
18	Bambang Dwi	Tajinan	Biaya	1
19	Ratna Ningrum	Tajinan	Kemudahan Akses	3
20	Ninis R.	Tajinan	Kemudahan Akses	3

Persentase Jawaban Responden

Kemudahan Akses	0.2
Jarak	0.35
Biaya	0.2
Pelayanan	0.25

Lampiran 7: Data Responden Pendidikan

Responden Siswa				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
1	Novi	Tajinan	Jarak	4
2	Intan	Tajinan	Jarak	4
3	Lidya	Tajinan	Jarak	4
4	Wulan	Tajinan	Jarak	4
5	Fathimah	Tajinan	Kemudahan Akses	3
6	Rizka Rudya	Pakis	Biaya	1
7	Nur Fitria	Tajinan	Jarak	4
8	Chuswatun	Tajinan	Kemudahan Akses	3
9	Aqib Tsakib	Wagir	Kemudahan Akses	3
10	Anjar K.	Wagir	Kemudahan Akses	3
11	Aninda Galih	Bululawang	Kemudahan Akses	3
12	Evi Rahmawati	Bululawang	Biaya	1
13	Laeli Nur R.	Bululawang	Biaya	1
14	Clara Cindy	Bululawang	Biaya	1
15	Ari Santi N.	Pakis	Kemudahan Akses	3
16	Riza Adi P.	Pakis	Kemudahan Akses	3
17	Firzie Eka C.	Tajinan	Jarak	4
18	Erwin Teguh	Bululawang	Jarak	4
19	Bintang F.	Bululawang	Jarak	4
20	Samarta Anang	Tajinan	Jarak	4
21	Agnar	Tajinan	Jarak	4
22	Putranto	Bululawang	Jarak	4
23	Satrio A.	Pakis	Kemudahan Akses	3
24	Agung Syaifudin	Pakis	Jarak	4
25	Bayu Dwi S.	Pakis	Biaya	1
26	Pri Lendy H.	Bululawang	Kemudahan Akses	3
27	Arief	Tajinan	Jarak	4
28	Wida Setyawan	Pakis	Jarak	4
29	Fery Handyan	Pakis	Jarak	4
30	Dimas W.	Tajinan	Kemudahan Akses	3
31	Fitra Nidiana	Tajinan	Kemudahan Akses	3
32	Betty S.	Tajinan	Jarak	4
33	Kartika Widya	Pakis	Jarak	4
34	Ika Rahmawati	Pakis	Jarak	4
35	Galuh Ayu	Pakis	Kemudahan Akses	3
36	Hadi P.	Pakis	Kemudahan Akses	3
37	Rima Oktaviani	Pakis	Kemudahan Akses	3
38	Panji Pradana	Pakis	Kemudahan Akses	3
39	Niken Hapsari	Pakis	Kemudahan Akses	3
40	Ningrum	Pakis	Jarak	4

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Lanjutan Lampiran 7

Responden Siswa				
No.	Nama	Alamat	Alasan	Skala
41	Acmad Abidin	Pakis	Jarak	4
42	Iis Sumarlina	Pakis	Jarak	4
43	Dewi Retno	Pakis	Kemudahan Akses	3
44	Indra Sapta	Pakis	Biaya	1
45	Bagus W.	Pakis	Biaya	1
46	Rizkyana Dian	Pakis	Biaya	1
47	Denny A.	Pakis	Kemudahan Akses	3
48	Atik Feni	Pakis	Kemudahan Akses	3
49	Fajar Rekso	Pakis	Kemudahan Akses	3
50	Lukman A.	Tajinan	Jarak	4

Persentase Jawaban Responden

Kemudahan Akses	0.4
Jarak	0.44
Biaya	0.16

Lampiran 8: Hasil Perhitungan Indeks Interaksi

No.	Kecamatan	P ₁	P ₂	P ₁ X P ₂	J	J ²	a	I ₁₂
1	Donomulyo	65027	756982	49224268514	52	2704	1	18204241,31
2	Kalipare	60365	756982	45695218430	37	1369	1	33378537,93
3	Pagak	43978	756982	33290554396	35	1225	1	27175962,77
4	Bantur	65417	756982	49519491494	45	2025	1	24454069,87
5	Gedangan	49353	756982	37359332646	47	2209	1	16912328,04
6	Sumbermanjing	87137	756982	65961140534	40	1600	1	41225712,83
7	Dampit	114713	756982	86835676166	35	1225	1	70886266,26
8	Tirtoyudo	57216	756982	43311482112	45	2025	1	21388386,23
9	Ampel Gading	51864	756982	39260114448	58	3364	1	11670664,22
10	Ponco Kusumo	88448	756982	66953543936	32	1024	1	65384320,25
11	Wajak	75887	756982	57445093034	24	576	1	99731064,30
12	Turen	105200	756982	79634506400	25	625	1	127415210,20
13	Bululawang	62830	756982	47561179060	11	121	1	393067595,50
14	Gondang Legi	74392	756982	56313404944	22	484	1	116350010,20
15	Pagelaran	61178	756982	46310644796	25	625	1	74097031,67
16	Kepanjen	93391	756982	70695305962	18	324	1	218195388,80
17	Sumber Pucung	51676	756982	39117801832	29	841	1	46513438,56
18	Kromengan	36898	756982	27931121836	33	1089	1	25648413,07
19	Ngajum	45530	756982	34465390460	25	625	1	55144624,74
20	Wonosari	41576	756982	31472283632	33	1089	1	28900168,62
21	Wagir	66794	756982	50561855708	8	64	1	790028995,40
22	Pakisaji	70561	756982	53413406902	11	121	1	441433114,90
23	Tajinan	47361	756982	35851424502	18	324	1	110652544,80
24	Tumpang	71126	756982	53841101732	21	441	1	122088666,10
25	Pakis	104364	756982	79001669448	14	196	1	403069742,10
26	Jabung	66067	756982	50011529794	20	400	1	125028824,50
27	Lawang	90468	756982	68482647576	18	324	1	211366196,20
28	Singosari	139594	756982	1,0567E+11	10	100	1	1056701453,00
29	Karangploso	60759	756982	45993469338	14	196	1	234660557,80
30	Dau	53867	756982	40776349394	12	144	1	283169093,00
31	Pujon	59984	756982	45406808288	27	729	1	62286431,12
32	Ngantang	53496	756982	40495509072	45	2025	1	19997782,26
33	Kasembon	27898	756982	21118283836	61	3721	1	5675432,37

Lampiran 9: Hasil Perhitungan Potensi Penduduk

Jarak

Kec	Dau	Karangploso	Singosari	Pakis	Tajinan	Bululawang	Pakisaji	Wagir
Dau	0	6	22	26	30	23	23	20
Karangploso	6	0	10	22	32	25	25	22
Singosari	22	10	0	16	28	21	21	18
Pakis	26	22	16	0	18	25	25	22
Tajinan	30	32	28	18	0	11	47	55
Bululawang	23	25	21	25	11	0	22	29
Pakisaji	23	25	21	25	47	22	0	7
Wagir	20	22	18	22	55	29	7	0

Jml Penduduk

Kec	Jumlah (Jiwa)
Dau	53867
Karangploso	60759
Singosari	139594
Pakis	104364
Tajinan	47361
Bululawang	62830
Pakisaji	70561
Wagir	66794

Perhitungan Pp1

X1	5985.22
X2	1687.75
X3	288.42
X4	154.38
X5	52.62
X6	118.77
X7	133.39
X8	166.99
Total	8587.54

Perhitungan Pp2

X1	1496.305556
X2	2430.36
X3	1395.94
X4	215.6280992
X5	46.25097656
X6	100.528
X7	112.8976
X8	138.0041322
Total	5935.914364

Lanjutan Lampiran 9

Perhitungan Pp3	
X1	111.2954545
X2	607.59
X3	2181.15625
X4	407.671875
X5	60.40943878
X6	142.4716553
X7	160.0022676
X8	206.154321
Total	3876.751262

Perhitungan Pp4	
X1	79.68491124
X2	125.535124
X3	545.2890625
X4	1288.444444
X5	146.1759259
X6	100.528
X7	112.8976
X8	138.0041322
Total	2536.5592

Perhitungan Pp5	
X1	59.85222222
X2	59.33496094
X3	178.0535714
X4	322.1111111
X5	1565.652893
X6	519.2561983
X7	31.94250792
X8	22.08066116
Total	2758.284126

Perhitungan Pp6	
X1	101.8279773
X2	97.2144
X3	316.5396825
X4	166.9824
X5	391.4132231
X6	2077.024793
X7	145.7871901
X8	79.42211653
Total	3376.211783

Perhitungan Pp7	
X1	101.8279773
X2	97.2144
X3	316.5396825
X4	166.9824
X5	21.44001811
X6	129.8140496
X7	5760.081633
X8	1363.142857
Total	7957.043017

Perhitungan Pp8	
X1	134.6675
X2	125.535124
X3	430.845679
X4	215.6280992
X5	15.65652893
X6	74.70868014
X7	1440.020408
X8	5452.571429
Total	7889.633448

Lanjutan Lampiran 9

pp	nilai pp	persentase	
1(dau)	8587.54	100	tertinggi
2(karangploso)	5935.914364	69.12240716	4
3(singosari)	3876.751262	45.14390922	5
4(pakis)	2536.5592	29.53766969	terendah
5(tajinan)	2758.284126	32.11960731	7
6(bululawang)	3376.211783	39.31523793	6
7(pakisaji)	7957.043017	92.65800237	2
8(wagir)	7889.633448	91.87303288	3

